

**PENGEMBANGAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI PELABUHAN
PERIKANAN NUSANTARA MUARA ANGKE, JAKARTA UTARA,
DKI JAKARTA AKIBAT PERUBAHAN PERATURAN *TRANSshipment***

SKRIPSI

Oleh :

**DIRGA MALIK SAPUTRA
NIM. 145080201111041**



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

**PENGEMBANGAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI PELABUHAN
PERIKANAN NUSANTARA MUARA ANGKE, JAKARTA UTARA,
DKI JAKARTA AKIBAT PERUBAHAN PERATURAN *TRANSshipment***

skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas
Perikanan dan ilmu kelautan
Universitas Brawijaya**

Oleh :

**DIRGA MALIK SAPUTRA
NIM. 145080201111041**



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara
Muara Angke, Jakarta Utara, DKI Jakarta Akibat Perubahan Peraturan
Transshipment**

Oleh :

DIRGA MALIK SAPUTRA
NIM. 145080201111041

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 25 September 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

DOSEN PEMBIMBING I

an



(Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT)

NIP. 19780717200502 1 004

Tanggal : 24 OCT 2019

**MENYETUJUI,
DOSEN PEMBIMBING II**



(Ir. Alfian Jauhari, M.Si)

NIP. 196004011987041 003

Tanggal : 24 OCT 2019

**MENGETAHUI,
KETUA JURUSAN PSPK**



(Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT)

NIP. 19780717200502 1 004

Tanggal : 24 OCT 2019

IDENTITAS TIM PENULIS

Judul : **Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di
Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke,
Jakarta Utara, DKI Jakarta Akibat Perubahan
Peraturan *Transshipment***

Nama Mahasiswa : DIRGA MALIK SAPUTRA

NIM : 145080201111041

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PENGUJI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Dr. Eng. ABU BAKAR SAMBAH, S.Pi, MT

Pembimbing 2 : Ir. ALFAN JAUHARI, M.Si

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING

Dosen Penguji 1 : DR. ALI MUNTAHA, API., SPI, MT

Dosen Penguji 2 : EKO SULKHANI YULIANTO, SPI, MSI

Tanggal Ujian : 25 September 2019

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkah, karunia serta ridhonya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi. Penulis menyadari laporan ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya dukungan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Ir. Happy Nursyam selaku dekan Fakultas perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian Skripsi.
2. Bapak Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT selaku ketua jurusan PSPK, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian Skripsi.
3. Bapak Sunardi, ST, MT selaku Kepala Program studi PSP, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian Skripsi.
4. Bapak Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Ir. Alfian Jauhari, M.Si selaku dosen pembimbing kedua Skripsi, atas bimbingan serta ilmunya dalam pelaksanaan Penelitian hingga terselesaikannya laporan ini.
5. Bapak DR. Ali Muntaha, API., S.PI, MT selaku dosen penguji pertama dan Bapak Eko Sulkhani Yulianto, SPI, MSI selaku dosen penguji kedua Skripsi, atas masukan serta ilmunya dalam penyusunan laporan terselaikan.
6. Kedua orang tua dan Keluarga yang selalu mendoakan serta memberi semangat untuk menyelesaikan laporan ini.
7. Teman teman PSP 2014 yang sudah banyak memberikan doa, dukungan serta motivasi untuk penulis menyelesaikan laporan Skripsi.

Malang, September 2019

Dirga Malik Saputra

RINGKASAN

DIRGA MALIK SAPUTRA, Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, Jakarta Utara, DKI Jakarta Akibat Perubahan Peraturan *Transshipment* (dibawah bimbingan Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT sebagai dosen pembimbing 1 dan Ir. Alfian Jauhari, M.Si sebagai dosen pembimbing 2)

Transshipment atau alih muat menurut Per.30/MEN/2012 adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan. legalnya *transshipment* di Indonesia sering di salahgunakan oleh para nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapan di tengah laut kepada nelayan asing yang masuk ke daerah Indonesia secara illegal tanpa melaporkan berapa hasil tangkapan mereka yang di jual kepada nelayan asing. Yang di laporkan kepada petugas adalah hasil tangkapan akhir sebelum kapal melakukan pendaratan ke pelabuhan pangkalan. Pencatatan hasil tangkapan pada saat pendaratan yang tidak di pantau langsung pada saat perhitungan ulang oleh petugas mengakibatkan hasil yang tidak akurat dan mengakibatkan kerugian yang tersamarkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui volume ikan yang dilelangkan, dampak yang diterima TPI akibat pelarangan *transshipment*, dan merekomendasikan strategi pengembangan TPI untuk kedepannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu untuk menggambarkan keadaan / kondisi lapang Tempat Pelelangan Ikan, serta menggunakan analisis data *time series* yang berfungsi menggambarkan volume produksi pertahun dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal. Analisis *time series* untuk melihat perbedaan volume produksi ikan yang dilelangkan sebelum dan sesudah kebijakan pelarangan kegiatan *transshipment*. Produksi ikan yang dilelangkan mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2009 sampai 2018. Pada tahun-tahun sebelum dilarang kegiatan *transshipment*, produksi ikan stabil. Pada kisaran terendah tahun 2010 dengan jumlah 10.432.428 Kg pertahun dan produksi tertinggi tahun 2013 dengan jumlah 20.520.709. Pada tahun-tahun berikutnya setelah kegiatan *transshipment* dilarang produksi ikan mengalami peningkatan yang signifikan, pada kisaran terendah tahun 2014 dengan jumlah 24.574.079 dan produksi tertinggi tahun 2016 dengan jumlah 50.253.204, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan kebijakan pelarangan produksi ikan mengalami peningkatan yang signifikan. Analisis data menggunakan metode SWOT yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) untuk mengetahui IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*) didapatkan kesimpulan matriks grand strategi kuadran I (*Agresif*) dengan memanfaatkan kekuatan untuk peluang – peluang yang ada.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkah, karunia serta ridhonya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENGEMBANGAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA MUARA ANGKE, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA AKIBAT PERUBAHAN PERATURAN *TRANSSHIPMENT*”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya di bawah bimbingan :

1. Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT
2. Ir. Alfian Jauhari, M.Si

Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan pengerjaannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan tanggapan, kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
IDENTITAS TIM PENULIS	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
RINGKASAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	3
1.5 Tempat dan Jadwal Pelaksanaan	3
2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pengertian IUU <i>Fishing</i>	4
2.2 Jenis Pelanggaran IUU <i>Fishing</i>	5
2.3 Peraturan IUU <i>Fishing</i>	7
2.4 Alih Muatan (<i>Transshipment</i>)	9
2.5 Pelabuhan Perikanan	10
2.6 Tempat Pelelangan Ikan.....	13
2.7 Definisi SWOT	14
2.8 Dampak.....	14
3 METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Metode Penelitian	15
3.2 Definisi Operasional Variabel	15
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16

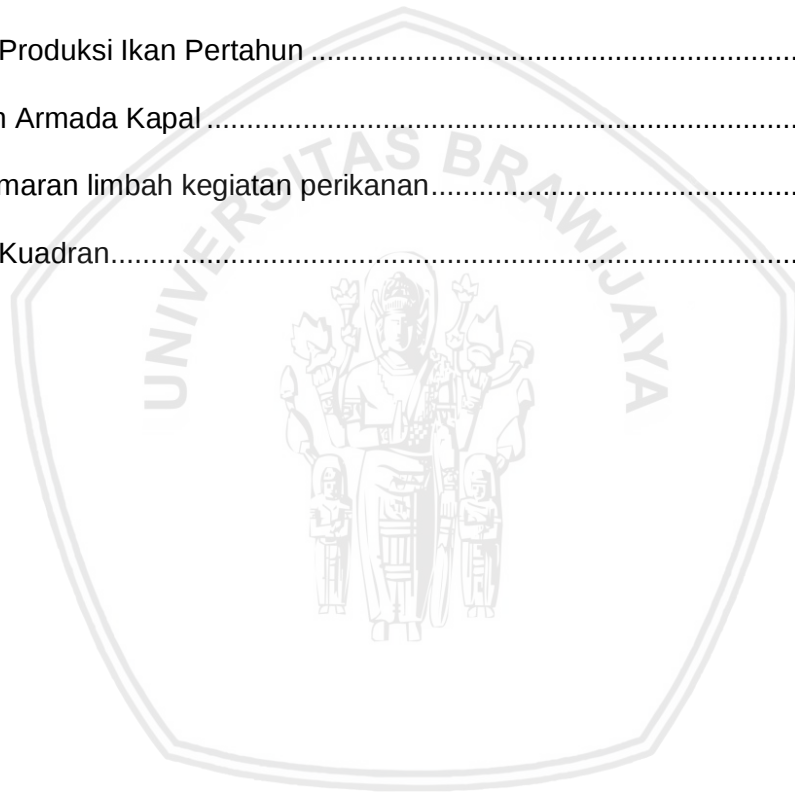
3.3.1	Data Primer.....	16
3.3.2	Data Sekunder.....	16
3.4	Analisis Data	17
3.4.1	Analisis Data Runtun Waktu (<i>Time Series</i>).....	17
3.4.2	Analisis SWOT.....	18
3.5	Prosedur Penelitian.....	23
4	HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1	Kondisi Umum Lokasi Penelitian	25
4.2	Produksi ikan yang dilelangkan	26
4.3	Unit Penangkapan	29
4.4	Jumlah Armada Kapal	30
4.5	Strategi Pengembangan TPI dari dampak Pelarangan <i>Transshipment</i> ..	31
4.5.1	Faktor Internal.....	31
4.5.2	Faktor Eksternal.....	35
5	KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1	Kesimpulan	41
5.2	Saran.....	41
	Daftar Pustaka	42
	Lampiran	44

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	3
2. Jenis atau Tipe IUU <i>Fising</i>	7
3. Matriks SWOT	20
4. Jumlah Produksi Ikan Sebelum Dilarang	26
5. Jumlah Produksi Ikan Sesudah Dilarang	27
6. Perbandingan Jumlah Produksi ikan Sebelum dan Sesudah Dilarang	28
7. Jumlah Kapal Yang Tercatat Di Pelabuhan Muara Angke	29
8. Jumlah Alat Tangkap Yang Tercatat Di pelabuhan Muara Angke	30
9. Matriks Kekuatan dan Kelemahan	34
10. Matriks Peluang dan Ancaman	37
11. Matrik SWOT IFAS dan EFAS	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram Matriks Grand Strategi.....	21
2. Prosedur Penelitian	23
3. Peta Lokasi Penelitian	25
4. Grafik Produksi Ikan Sebelum Dilarang	26
5. Grafik Produksi Ikan Sesudah Dilarang	27
6. Grafik Produksi Ikan Pertahun	28
7. Jumlah Armada Kapal	30
8. Pencemaran limbah kegiatan perikanan.....	33
9. Grafik Kuadran.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perhitungan SWOT	44
2. Kuisisioner Rating	52
3. Kuisisioner Pembobotan	55
4. Dokumentasi.....	58



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Muara Angke terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Pelabuhan Perikanan yang memiliki luas ± 67 hektar ini dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ad. 71313511969 (UPT-PKPP dan PPN Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta 2004). Dalam perkembangannya, PPN Muara Angke mampu menjadi pusat kegiatan perikanan tradisional diantaranya sebagai tempat pemukiman nelayan, pasar eceran maupun pasar grosir, dan juga untuk melakukan pelelangan ikan-ikan hasil tangkapan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, di kawasan PPN tersebut. Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPN Muara Angke dan prasarana pendukungnya memiliki luas 2.240 m^2 ($64\text{m} \times 35\text{m}$) dan mampu menampung produksi ikan kurang lebih sebesar 97 ton/jam. Tempat Pelelangan Ikan ini tergolong baru karena baru mulai beroperasi sejak Juli 2005. Sebelumnya kegiatan pelelangan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan lama yang memiliki luas 1.420 m^2 dan hanya mampu menampung produksi ikan sebesar 82 ton/jam.

Pemerintah mengeluarkan peraturan baru karena melihat banyaknya kasus – kasus pelabuhan yang mati (jarang beroperasi), dikarenakan tidak adanya kapal yang mendaratkan ikan ke pelabuhan di akibatkan dari legalnya *transshipment* di Indonesia. Menurut Tsamenyi (2010) dalam Amelya (2014) legalnya *transshipment* di Indonesia sering di salahgunakan oleh para nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapan di tengah laut kepada nelayan asing yang masuk ke daerah Indonesia secara illegal tanpa melaporkan berapa hasil tangkapan mereka yang di jual kepada nelayan asing. Hasil tangkapan yang di laporkan kepada petugas adalah hasil

tangkapan akhir sebelum kapal melakukan pendaratan ke pelabuhan pangkalan. Pencatatan hasil tangkapan pada saat pendaratan yang tidak di pantau langsung pada saat perhitungan ulang oleh petugas mengakibatkan hasil yang tidak akurat dan mengakibatkan kerugian yang tersamarkan.

Transshipment atau alih muat menurut Per.30/MEN/2012 adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan. Selanjutnya salah satu upaya mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab maka kegiatan alih muat diberhentikan. Hal ini terwujud dalam diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014. Diberhentikannya kegiatan alih muatan memunculkan konflik baru, yaitu banyak usaha perikanan tangkap yang memilih untuk tidak melaut (Amelia dan Tiwi, 2017).

1.2 Perumusan Masalah

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwasanya *transshipment* diperbolehkan. Hal ini memicu terjadinya banyak pelanggaran dan kerugian yang besar bagi negara salah satunya adalah tidak berfungsinya tempat pelelangan ikan di beberapa pelabuhan diakibatkan oleh minimnya pasokan ikan yang di daratkan. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi dasar penelitian, yaitu:

1. Apakah yang melatar belakangi tidak diperbolehkannya kegiatan *transshipment*
2. Dampak apa saja yang terjadi terhadap tempat pelelangan ikan (TPI) ketika aturan tentang *transshipment* dilarang

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan dilakukannya Penelitian adalah :

1. Mengetahui volume ikan yang dilelang di Pelabuhan Muara Angke sebelum dan sesudah *transshipment* diberlakukan
2. Mengetahui dampak yang disebabkan oleh aturan tentang *transshipment* terhadap kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3. Merekomendasikan strategi pengembangan pelabuhan untuk tempat pelelangan ikan yang terkena dampak pelarangan *transshipment*

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan pihak pelabuhan dalam merumuskan strategi yang akan dilakukan guna menjalankan fungsi pelabuhan secara efektif dan efisien.

1.5 Tempat dan Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan perikanan nusantara Muara Angke, Jl. Dermaga Muara Ujung Desa Penjaringan No.1, Pelelangan Ikan, Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada bulan September 2018.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Mei				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																				
2	Pelaksanaan Penelitian																				
3	Pengumpulan Data																				

Penyusunan Laporan

Keterangan :  Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian IUU Fishing

Menurut Usmawadi (2013), IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) fishing adalah:

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut.
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Menurut Yudi (2015), *Illegal Fishing* dalam naskah IPOA on IUU Fishing, pengertian *illegal*, *Unreported*, dan *Unregulated Fishing* adalah sebagai berikut:

A. Yang dimaksud dengan *Illegal Fishing* adalah:

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada dibawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangnya.

B. Sedangkan yang dimaksud dengan *unreported fishing*:

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau sengaja dilaporkan dengan memberi data yang tidak benar kepada penguasa otoritas nasional terkait, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri tersebut

C. Yang dimaksud dengan *unregulated fishing* adalah:

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada wilayah atau terhadap stok ikan yang belum memiliki pengaturan tentang pengelolaan dan konservasinya dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan

repository.ub.ac.id

tanggungjawab negara berdasarkan ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumberdaya hayati laut.

2.2 Jenis Pelanggaran IUU Fishing

Menurut Yudi (2015), Bentuk kegiatan dan penyebab terjadinya *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) *fishing* di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bentuk *Illegal Fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia antara lain sebagai berikut:

- 1) Penangkapan ikan tanpa ijin
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu
- 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang dan
- 4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan ijin.

Penyebab *Illegal Fishing* antara lain sebagai berikut

- 1) Peningkatan permintaan ikan (dalam negeri / luar negeri)
- 2) Sumberdaya ikan di negara lain berkurang atau habis
- 3) Lemahnya armada perikanan nasional
- 4) Izin / dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi
- 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut
- 6) Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan
- 7) Belum ada visi yang sama dari aparat penegak hukum dan
- 8) Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana.

Bentuk *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia antara lain:

- 1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.
- 2) Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* ditengah laut).

Penyebab *unreported fishing* antara lain sebagai berikut:

- 1) Lemahnya peraturan perundang-undangan
- 2) Sistem pengumpulan data hasil tangkapan / angkutan ikan yang belum sempurna
- 3) Belum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingnya menyampaikan data hasil tangkapan / angkutan ikan
- 4) Hasil tangkapan dan *fishing ground* dianggap rahasia dan tidak untuk diketahui pihak lain (saingan)
- 5) Lemahnya ketentuan sanksi dan pidana
- 6) Bentuk wilayah kepulauan menyebabkan banyaknya tempat pendaratan ikan yang sebagian besar tidak terpantau dan terkontrol
- 7) Unit penangkapan dibawah
- 8) Sebagian besar pengusaha yang memiliki armada penangkapan memiliki pelabuhan / tangkahan tersendiri
- 9) Laporan produksi yang diberikan oleh pengurus perusahaan kepada dinas terkait cenderung lebih rendah dari sebenarnya.

Bentuk *unregulated fishing* di perairan Indonesia antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum ada pengaturan mekanisme pencatatan data hasil tangkap dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada
- 2) Belum ada pengaturan wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang
- 3) Belum ada pengaturan aktivitas *sport fishing*
- 4) Belum ada pengaturan kegiatan-kegiatan penangkap ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang

Penyebab *unregulated fishing* antara lain sebagai berikut :

- 1) Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia masih dianggap memadai dan belum membahayakan
- 2) Sibuk mengatur yang sudah ada karena banyaknya masalah
- 3) Orientasi jangka pendek
- 4) Beragamnya kondisi daerah perairan dan sumber daya ikan

5) Indonesia belum menjadi anggota organisasi perikanan internasional.

Menurut Freshty (2014), ada beberapa jenis atau tipe kasus yang termasuk ke dalam pelanggaran IUU *Fishing* di Indonesia antara lain sebagai berikut :

Tabel 2. Jenis atau Tipe IUU *Fishing*

No	Jenis atau Tipe IUU <i>Fishing</i>
1	Kapal iakan asing tidak memiliki izin SIPI/SIKPI
2	Tidak memiliki Tanda Pendaftaran untuk kapal dengan ukuran di bawah 5 GT
3	Tidak mendaftar bagi kapal dengan ukuran di atas 5 GT
4	Kapal tidak mendaftar ke RFMO (<i>Regional fisheries management organisations</i>) bagi kapal yang melakukan penangkapan di laut lepas
5	Melakukan penangkapan di luar wilayah SIPI atau melakukan pengangkutan di luar SIKPI (pelanggaran <i>fishing ground</i>)
6	Adanya surat izin yang sama, namun diduplikasi untuk dapat digunakan pada beberapa kapal yang sulit untuk dideteksi karena biasanya spesifikasi kapalnya sama persis
7	Indikasi pelanggaran tonase kapal yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi fisik kapal
8	<i>Transshipment</i> , penjualan ikan secara langsung ke negara lain, ABK nelayan asing
9	Tidak melaporkan dengan benar (<i>underreported, unreported, atau misreported</i>)
10	Banyaknya hasil sampingan tangkapan berupa <i>baby tuna</i> yang pada hukum internasional melanggar prinsip-prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan
11	VMS tidak diaktifkan
12	Pelanggaran alat tangkap
13	ABK asing tidak sesuai dengan SIPI

Sumber : Freshty (2014)

2.3 Peraturan IUU *Fishing*

Menurut Abdul dan Udiyo (2014), Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing di Indonesia diantaranya Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (*Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie*, Stbl.1939 No. 442), UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang

Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Kelautan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik(*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun kenyataannya di Indonesia masih banyak sekali kasus *illegal fishing* yang terjadi, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor KP mengalami fluktuasi. Pada 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan kerugian negara dari IUU *Fishing* sebesar Rp 300 Triliun dan menimbulkan kerusakan habitat dan ekosistem laut.

Upaya menutup pintu bagi *illegal fishing* di Indonesia, pemerintah dengan tegas menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pukat Harimau, dan sebanyak lagi Undang-Undang lainnya, peraturan pemerintah, serta keputusan presiden. Selain dari itu berkaitan dengan kedaulatan bangsa di dasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Djuanda 1957, UNCLOS III tahun 1982 tentang konsep kepulauan Indonesia, serta Zona Ekonomi Eksklusif untuk menindak tegas secara hukum terhadap para *illegal fishing* dengan cara membakar dan menenggelamkan kapalnya. Tindakan pemerintah itu tidak melanggar hukum, karena sudah sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional (Bendar, 2015).

2.4 Alih Muatan (*Transshipment*)

Definisi Alih Muatan (*Transshipment*) adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan atau pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan (PerMen KP No.30 Tahun 2012). *Transshipment* adalah pemindahan ikan hasil tangkapan tuna atau spesies seperti tuna dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan (PerMen KP No.12 Tahun 2012).

Pendaratan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dapat dilakukan langsung pada pelabuhan pangkalan atau melalui alih muatan di laut. Alih muatan dilakukan dengan persyaratan:

- a) mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama
- b) pelaksanaan alih muatan diawasi oleh pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (*observer*)
- c) transmitter VMS dalam kondisi aktif dan dapat dipantau secara online
- d) melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI
- e) melaporkan kepada pengawas perikanan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI
- f) mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan yang ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal dan disampaikan kepada kepala pelabuhan pangkalan.

Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan akan diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI (PerMen KP No.26 Tahun 2013).

2.5 Pelabuhan Perikanan

Menurut Pramitasari (2005), Pelabuhan Perikanan sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 8 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelas yakni :

1. Pelabuhan Perikanan Samudera.

Pelabuhan ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi :

Kriteria teknis terdiri dari:

- Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas
- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minimal 3 m
- Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 G
- Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.

Kriteria operasional terdiri dari:

- Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor
- Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari
- Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

2. Pelabuhan Perikanan Nusantara.

Pelabuhan ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi :

Kriteria teknis terdiri dari:

- Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI
- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 30 GT
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minimal 3 m
- Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT
- Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.

Kriteria operasional terdiri dari:

- terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari
- Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

3. Pelabuhan Perikanan Pantai.

Pelabuhan ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi :

Kriteria teknis terdiri dari:

- Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia
- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 10 GT
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minimal 2 m
- Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT

- Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.

Kriteria operasional terdiri dari:

- Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari
- Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

4. Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pelabuhan ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi :

Kriteria teknis terdiri dari:

- Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia
- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minimal 1 m
- Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT
- Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

Pengklasifikasian pelabuhan perikanan menjadi 4 tersebut didasarkan atas ketersediaan fasilitas untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna yang ada di pelabuhan perikanan yang bersangkutan semakin besar kemampuan fasilitas untuk menampung dan memberikan pelayanan kepada para pengguna kan semakin tinggi kelasnya.

Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang

dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 tahun 2006, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan. Pelabuhan perikanan dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Eneng, 2012).

2.6 Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat untuk memasarkan hasil tangkapan, sebagai salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Pemasaran ikan dilakukan melalui pelelangan. Menurut sejarahnya pelelangan ikan telah dikenal sejak tahun 1922, didirikan dan diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan terutama di Pulau Jawa, dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak / pengijon, dan membantu nelayan mendapatkan harga yang layak agar tidak mengalami kerugian (Pramitasari, 2005).

Tempat pelelangan ikan memegang peranan penting dalam suatu pelabuhan perikanan, oleh sebab itu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat tercapai manfaat secara optimal. Fungsi tempat pelelangan ikan adalah untuk melelang ikan, dimana terjadi pertemuan antara penjual (nelayan dan pemilik kapal) dengan pembeli (pedagang atau agen perusahaan perikanan). Letak dan pembagian ruang di gedung pelelangan harus direncanakan supaya aliran produk (*flow of product*) berjalan dengan cepat (Lubis dalam Eneng, 2012).

2.7 Definisi SWOT

Analisis SWOT (*SWOT analysis*) yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, rekan di perusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan jasa lembaga pemindaian untuk memperoleh keliping surat kabar, riset di internet, dan analisis tren-tren domestik dan global yang relevan (Richard, 2010).

Freddy Rangkuti (2014), menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini.

2.8 Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan cukup hebat antar dua benda sehingga menyebabkan perubahan atau perbedaan dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dampak positif adalah akibat atau pengaruh baik yang menguntungkan dan didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi sedangkan dampak negatif adalah akibat atau pengaruh yang dihasilkan dan cenderung memperburuk keadaan ataupun menghancurkan sistem (KBBI online, 2019).

3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu untuk menggambarkan keadaan / kondisi lapang Tempat Pelelangan Ikan, serta menggunakan analisis data *time series* yang berfungsi menggambarkan volume produksi pertahun dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Metode analisis deskriptif secara hakekatnya adalah data yang telah terkumpul itu kemudian diseleksi, dikelompokkan, dilakukan pengkajian, interpretasi dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Untuk menentukan keputusan membuat sendiri atau membeli produk dari pihak luar dalam perhitungan biaya diferensial penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif (Dewinta,2014).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Dan variabel bebas yang digunakan adalah peraturan tentang *transshipment*.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Dan variabel terikat yang digunakan adalah produksi ikan yang dilelangkan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

3.3.1 Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), yang dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu objek 32 benda, kejadian atau kegiatan, dan data mengenai segala hal berkaitan dengan strategi peningkatan daya saing (Lofland *dalam* Moleong, 2005).

Dipenelitian ini data primernya terdiri dari wawancara dan identifikasi kondisi tempat pelelangan ikan yang diperoleh melalui observasi lingkungan sekitar dan terlibat langsung dalam kegiatan pelelangan ikan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui literatur dan studi pustaka. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Sugiono, 2009).

Data sekunder didapatkan dari total hasil tangkapan yang di daratkan di Pelabuhan Muara Angke, data sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini seperti jurnal, artikel ilmiah, skripsi, peraturan pemerintah.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah langkah terakhir dari penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang akan menjawab semua pertanyaan yang menjadi tujuan penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis *time series* dan analisis SWOT.

3.4.1 Analisis Data Runtun Waktu (*Time Series*)

Menurut Seng (2012), analisis data runtun waktu (*time series*) berarti memecah data lampau menjadi komponen-komponen dan memproyeksikannya ke depan (*forecasting*). Dengan kata lain, tujuan analisis data runtun waktu adalah mengidentifikasi komponen faktor yang dapat memengaruhi nilai dalam deret data, sehingga dapat digunakan untuk peramalan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya, suatu data runtun waktu dapat terdiri atas satu atau beberapa komponen dari empat komponen utama berikut :

A. *Trend* (T)

Trend adalah komponen jangka panjang yang menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam data runtun waktu untuk suatu periode waktu tertentu. Dengan lebih sederhana, dapat dinyatakan bahwa *Trend* adalah suatu garis halus atau kurva yang menunjukkan suatu kecenderungan umum dari suatu data runtun waktu. Misalnya adalah kenaikan produksi, inflasi, dan perubahan populasi.

B. Siklus (*Cycles* / C)

Komponen siklus adalah deret tidak beraturan berupa fluktuasi gelombang atau siklus dengan durasi waktu yang panjang. Komponen ini biasanya berhubungan dengan siklus bisnis (*business cycle*), dimana suatu gerakan dianggap sebagai siklus apabila timbul kembali setelah jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh data runtun waktu dengan komponen siklus adalah data kondisi perekonomian yang perubahannya lebih dari satu tahun.

C. Musiman (*Seasonality* / S)

Komponen musiman adalah suatu pola dari fluktuasi permintaan (*demand*) di atas atau di bawah garis trend yang terjadi tiap tahunnya. Fluktuasi musiman yang dimaksud dapat diklasifikasikan secara kuartal, bulanan, mingguan, atau harian, dan mengarah pada pola yang berubah secara regular dalam suatu waktu. Misalnya kenaikan harga bahan – bahan pokok yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri tiap tahun, dan sebagainya.

D. *Irregular* (I)

Komponen *irregular* adalah gerakan sporadis atau fluktuasi yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak dapat diprediksi atau kejadian non - periodik, seperti terjadinya perang, bencana alam, dan lain sebagainya.

Metode analisis *time series* digunakan untuk melihat pengaruh kebijakan *Transshipment* sebelum dan sesudah di terapkan terhadap produksi hasil tangkapan yang didaratkan ke Pelabuhan Muara Angke. Karena dengan penyajian data *time series*, bisa dilihat produksi hasil tangkapan mengalami peningkatan atau penurunan.

3.4.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor - faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini. Analisis SWOT membandingkan antara faktor *eksternal* peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor *internal* kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) (Zuhrotun,2014).

Rangkuti (2006) juga mengemukakan matriks SWOT dapat digambarkan sebagai hasil identifikasi dan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisa IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*). Hasil yang diperoleh adalah data yang berupa titik koordinat posisi instansi/perusahaan tersebut dalam koordinat. Langkah-langkah dalam melakukan analisa SWOT adalah sebagai berikut :

1. Pembobotan dengan analisa SWOT

- a. Menentukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan, serta faktor peluang dan ancaman. Kolom 1 dilakukan penyusunan terhadap semua faktor-faktor yang dimiliki oleh perusahaan dengan membagi menjadi dua bagian, yaitu *internal* /"IFE" (*Internal Factor Evaluation*) dan faktor *eksternal* /"EFE" (*Eksternal Factor Evaluation*).
- b. Memberi bobot di Kolom 2 pada masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,00 sampai dengan 0,00 (tidak penting). Jumlah bobot untuk *strength* dan *weakness* 1,00 demikian pula dengan jumlah bobot untuk *opportunity* dan *threat* juga 1,00.
- c. Kolom 3 diisi pemberian rating untuk masing-masing faktor tersebut berdasarkan pengaruhnya terhadap kondisi pelabuhan. Rentang nilai rating adalah 1 sampai 4, dimana perinciannya :

1 = sangat lemah
2 = lemah
3 = cukup kuat
4 = sangat kuat
- d. Mengalikan bobot pada kolom 2 dan rating pada kolom 3 untuk menentukan skor tiap-tiap faktor
- e. Menjumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan. Sehingga dapat diletakkan pada kuadran yang tepat dan sesuai, kemudian

dilakukan pembuatan matriks SWOT yang akan menjelaskan alternatif strategi yang akan dilakukan.

2. Dari total skor masing-masing kriteria S-W-O-T digunakan untuk penggambaran posisinya pada matriks SWOT.

Adapun alat yang dipakai untuk menyusun strategi suatu instansi/perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan strategi, diagram matriks SWOT dapat dijelaskan pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Matriks SWOT

EFA	IFA	STRENGTH (S) Menentukan faktor kekuatan internal	WEAKNESS (W) Menentukan faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O) Menentukan faktor peluang eksternal		STRATEGI SO Menciptakan strategi yang menggunakan `kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Digunakan jika perusahaan berada pada kuadran I	STRATEGI WO Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Digunakan jika perusahaan berada pada kuadran III
THREAT (T) Menentukan faktor ancaman eksternal		STRATEGI ST Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan mengatasi ancaman. Digunakan jika perusahaan berada pada kuadran II	STRATEGI WT Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Digunakan jika perusahaan berada pada kuadran IV

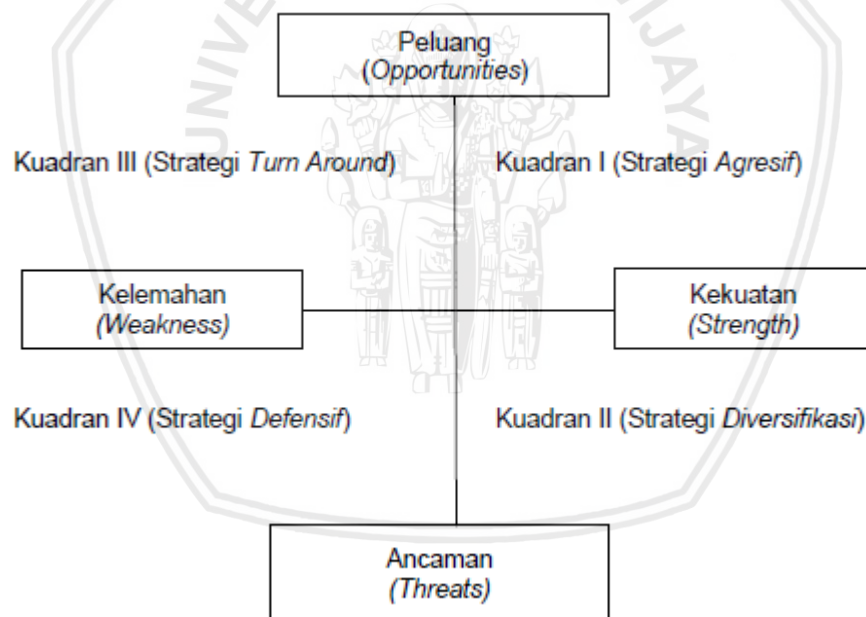
Sumber : Rangkuti (2006)

Empat set kemungkinan alternatif strategi yang dihasilkan dari matriks SWOT diatas adalah sebagai berikut :

1. Strategi *Strength Opportunities* (SO), strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar instansi atau perusahaan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

2. Strategi *Weaknesses Opportunities* (WO), merupakan strategi yang bertujuan untuk memperkecil kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada.
3. Strategi *Strength Threats* (ST), merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh instansi atau perusahaan untuk mengatasi segala ancaman.
4. Strategi *Weakness Threats* (WT), strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat bertahan dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Menurut Ranguti (2006), dengan posisi perusahaan pada kuadran yang tepat maka perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Adapun untuk melihat posisi tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Diagram Matriks Grand Strategi

1. Jika posisi perusahaan berada pada kuadran I (positif, positif) maka, strategi yang harus diterapkan untuk perusahaan yang berada pada posisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif
2. Jika perusahaan yang berada pada kuadran II (positif, negatif) maka strategi yang harus dilakukan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

jangka panjang dengan cara strategi *diversifikasi*, artinya perusahaan dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya

3. Jika perusahaan berada pada kuadran III (negatif, positif) maka, strategi yang direkomendasikan adalah *Turn Around* atau ubah strategi, yaitu dengan mengubah strategi sebelumnya dan meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik
4. Jika perusahaan berada pada kuadran IV (negatif, negatif) itu menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi situasi yang sangattidak menguntungkan, dimana perusahaan menghadapi berbagai ancaman juga menghadapi kelemahan internal. Oleh karena itu strategi yang direkomendasikan adalah strategi *defensif* atau strategi bertahan guna mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok.

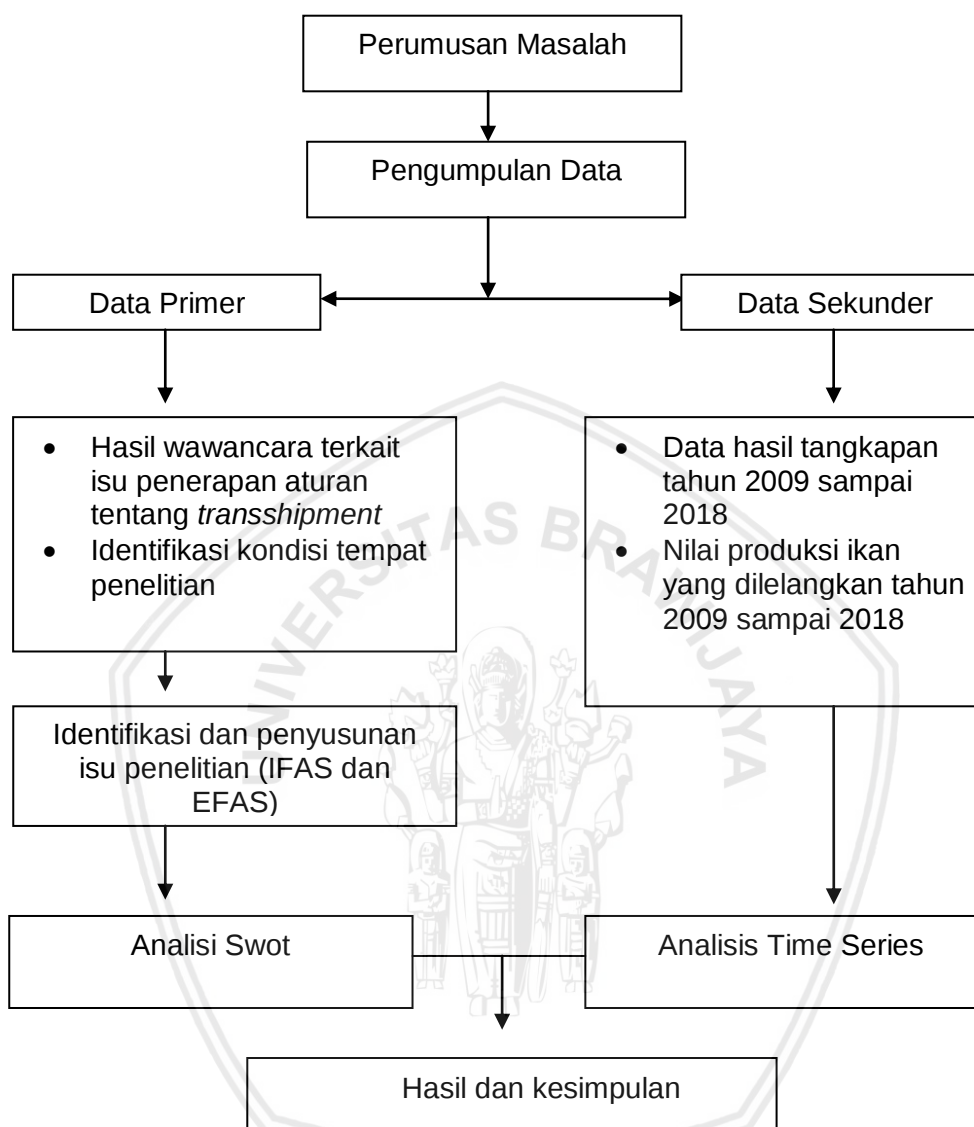
Cara yang digunakan untuk menentukan titik koordinat kuadran adalah hasil dari pengurangan masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman). Hasil dari pengurangan masing-masing faktor akan dijadikan titik koordinat. Faktor internal yaitu kekuatan dikurangi dengan kelemahan yang nantinya nilai akan dijadikan titik koordinat x. Faktor eksternal yaitu peluang dikurangi dengan ancaman yang nantinya nilai akan dijadikan titik koordinat y. Proses perhitungan kuadran untuk mencari sumbu x dan sumbu y :

$$X = \text{Kekuatan (S)} - \text{Kelemahan (W)}$$

$$Y = \text{Peluang (O)} - \text{Ancaman (T)}$$

3.5 Prosedur Penelitian

Alur penelitian dapat di lihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Prosedur Penelitian

Penjelasan alur penelitian sebagai berikut :

1. Observasi ke lapang guna menggambarkan kondisi lingkungan serta mencari target yang akan di wawancara
2. Wawancara target yang terkait dengan semua kegiatan tempat Pelelangan ikan guna mencari tau pengaruh atau dampak yang diterima dari perubahan peraturan *transshipment* terhadap tempat pelelangan ikan (TPI)

3. Mengumpulkan data produksi ikan di pelabuhan untuk membandingkan sebelum dan sesudah perubahan kebijakan *transshipment* diterapkan
4. Data hasil wawancara selanjutnya diolah melalui Analisi SWOT untuk mengetahui faktor *internal* dan *eksternal* kegiatan Tempat pelelangan Ikan di pelabuhan Muara Angke
5. Selanjutnya adalah interpretasi dari hasil analisis data guna menjawab tujuan penelitian

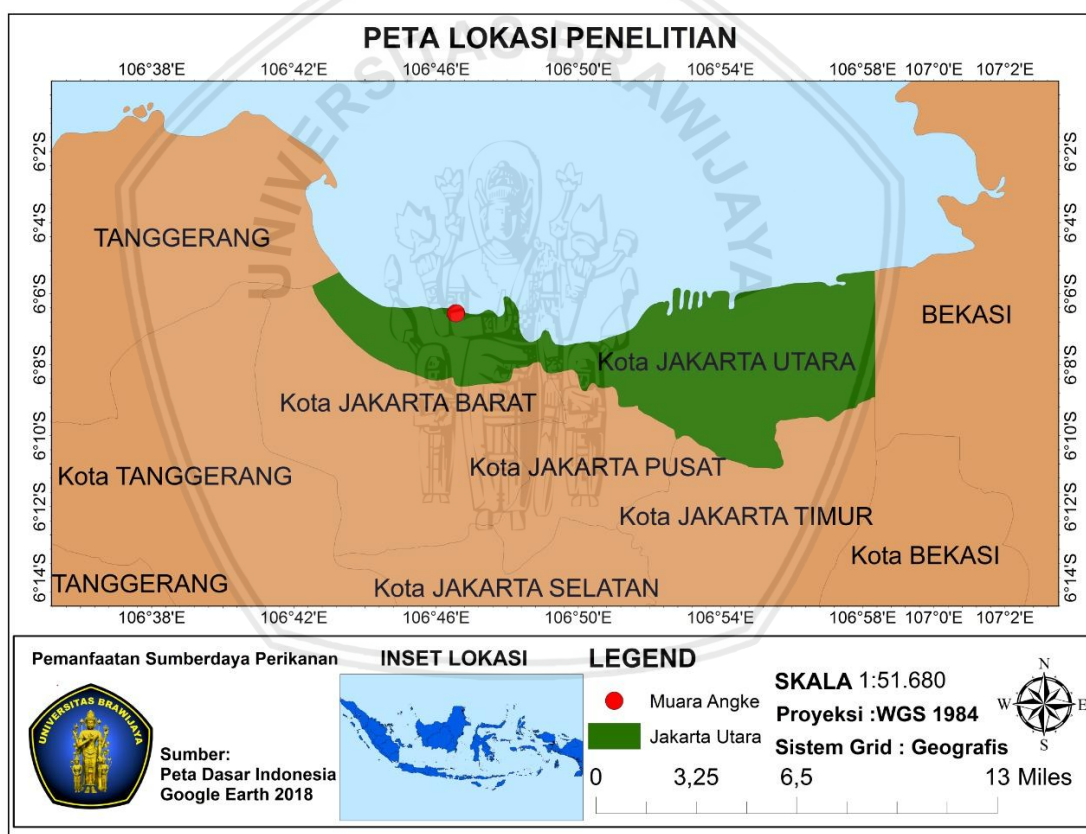


4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Pelabuhan perikanan Muara Angke adalah pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian Pemprov DKI Jakarta mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan pelabuhan tersebut.

Secara geografis Pelabuhan Perikanan Muara Angke terletak pada posisi $6^{\circ}6'21''\text{LS}$ dan $106^{\circ}46'29.8''\text{BT}$ di kota Jakarta Utara, DKI Jakarta seperti pada Gambar 3.



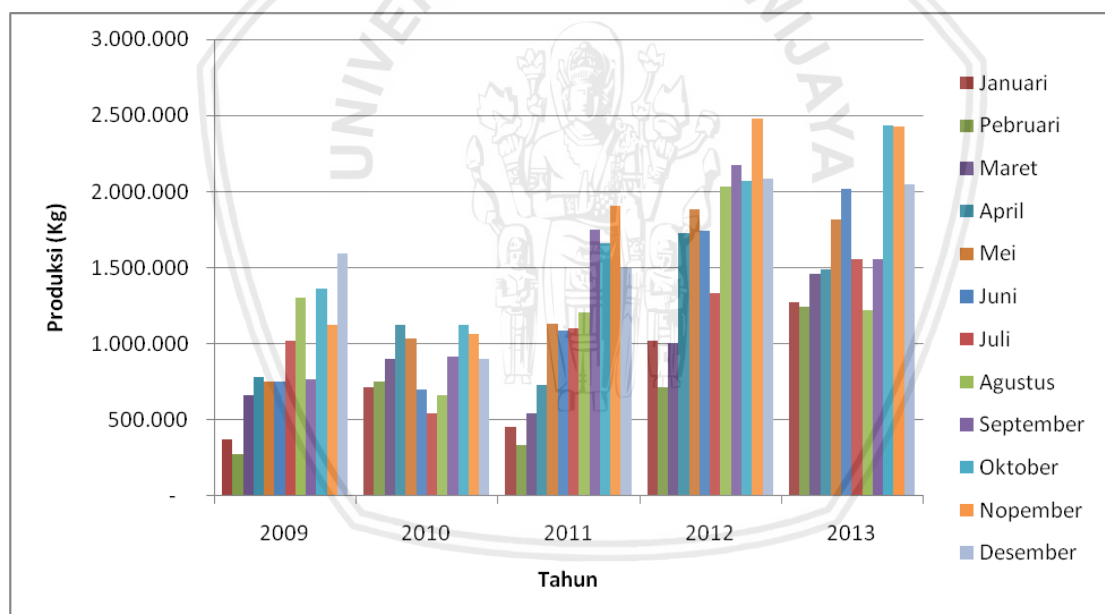
Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian

Lokasi Pelabuhan Muara Angke berada di Jl. Dermaga Muara Ujung Desa Penjaringan No.1, Pelelangan Ikan, Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Yang jika dilihat dari sekitar pelabuhan berbatasan dengan,

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Jakarta dan Laut Jawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali Angke dan Jalan Pluit Karang Asri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pluit Karang Barat dan Green Bay Pluit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suaka Marga Satwa Muara Angke.

4.2 Produksi ikan yang dilelangkan

Sebelum di buatnya peraturan tentang pelarang kegiatan *transshipment* di Indonesia jumlah ikan yang di lelangkan di pelabuhan Muara Angke memang terlihat sangat sedikit jika di dibandingkan dengan setelah dikeluarkannya Permen KP No.57 tahun 2014 tentang pelarangan kegiatan *transshipment* di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dari graifk ikan yang di lelangkan terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah peraturan dikeluarkan seperti pada Gambar 4 dan Gambar 5.



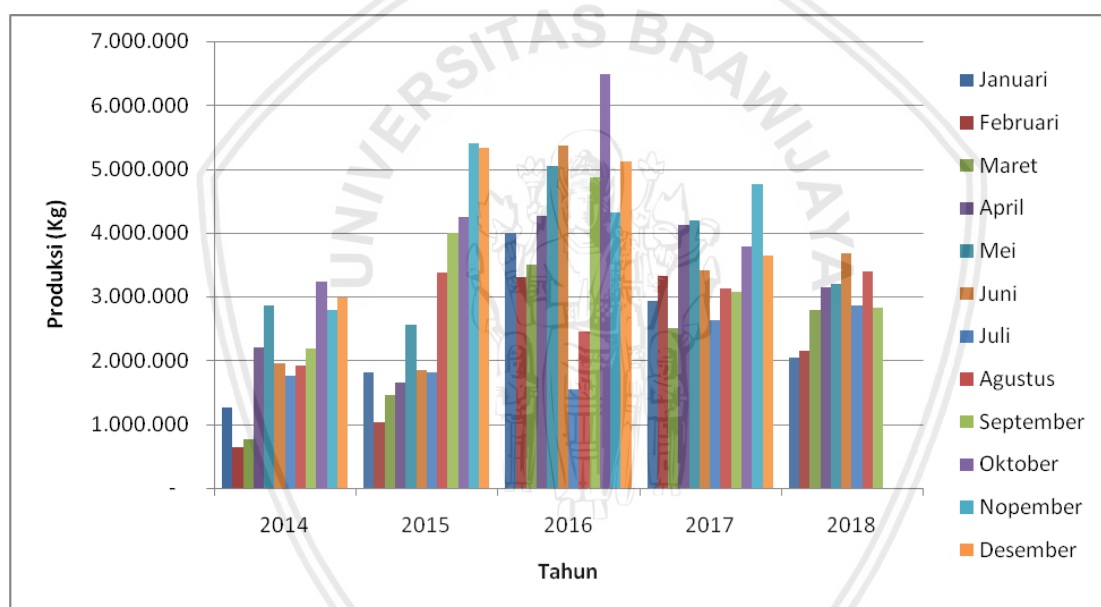
Gambar 4. Grafik Produksi Ikan Sebelum Dilarang

Tabel 4. Jumlah Produksi Ikan Sebelum Dilarang

Bulan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Januari	369.091	714.837	450.557	1.016.632	1.273.434
Pebruari	277.598	749.223	335.432	713.675	1.244.589
Maret	665.175	897.916	542.393	1.004.173	1.455.526
April	781.946	1.127.659	725.926	1.725.139	1.485.289

Mei	750.992	1.038.140	1.133.766	1.885.458	1.814.616
Juni	752.130	696.324	1.090.448	1.745.019	2.014.568
Juli	1.021.984	543.976	1.100.151	1.334.010	1.553.896
Agustus	1.303.411	658.819	1.208.538	2.033.510	1.220.666
September	769.351	913.225	1.747.179	2.176.347	1.555.834
Oktober	1.360.423	1.124.195	1.661.133	2.069.613	2.431.185
Nopember	1.122.046	1.065.808	1.905.472	2.478.073	2.423.345
Desember	1.596.367	902.306	1.498.227	2.082.626	2.047.761
Jumlah	10.770.514	10.432.428	13.399.222	20.264.275	20.520.709

Dari grafik dan tabel produksi ikan yang dilelangkan mulai tahun 2009 sampai 2013 terlihat sangat sedikit pertumbuhan produksi ikan dari tahun ke tahun bahkan hampir bisa dikatakan stabil.



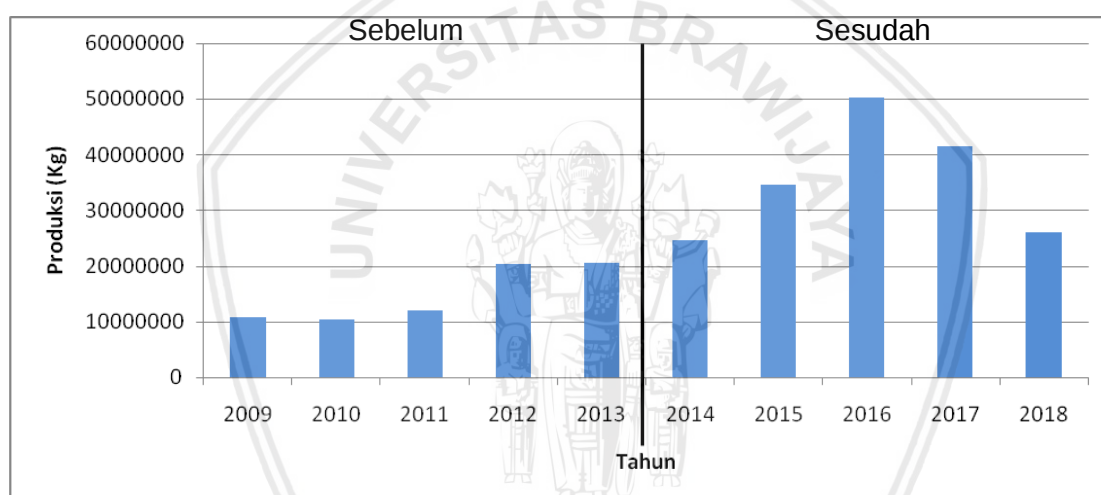
Gambar 5. Grafik Produksi Ikan Sesudah Dilarang

Tabel 5. Jumlah Produksi Ikan Sesudah Dilarang

Bulan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	1.265.703	1.815.610	4.001.935	2.933.021	2.037.483
Pebruari	643.551	1.026.559	3.299.076	3.327.776	2.144.776
Maret	756.838	1.454.122	3.498.108	2.500.566	2.794.914
April	2.203.672	1.650.127	4.269.631	4.129.538	3.141.168
Mei	2.862.915	2.554.687	5.052.733	4.196.240	3.206.247
Juni	1.959.390	1.846.000	5.365.222	3.407.834	3.671.357
Juli	1.767.096	1.809.684	1.542.106	2.634.491	2.868.740

Agustus	1.921.485	3.378.755	2.452.968	3.129.073	3.400.250
September	2.187.378	3.997.618	4.863.389	3.081.872	2.825.905
Oktober	3.224.855	4.241.057	6.477.706	3.775.613	
Nopember	2.789.212	5.401.143	4.318.645	4.762.600	
Desember	2.991.984	5.331.845	5.111.685	3.647.540	
Jumlah	24.574.079	34.507.207	50.253.204	41.526.164	26.090.840

Pada tahun selanjutnya pemerintah menghentikan atau melarang kegiatan *transshipment* yang memiliki dampak baik bagi pertumbuhan produksi ikan yang dilelangkan. Jika digabungkan menjadi grafik tahunan mulai dari tahun 2009 sampai 2018 maka akan terlihat jelas bahwa ketika peraturan dikeluarkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Seperti pada Gambar 6 dan tabel 6.



Gambar 6. Grafik Produksi Ikan Pertahun

Tabel 6. Perbandingan Jumlah Produksi ikan Sebelum dan Sesudah Dilarang

Grafik ikan yang dilelangkan			
Sebelum Dilarang		Sesudah Dilarang	
Tahun	Jumlah Produksi (Kg)	Tahun	Jumlah Produksi (Kg)
2009	10.770.514	2014	24.574.079
2010	10.432.428	2015	34.507.207
2011	13.399.222	2016	50.253.204
2012	20.264.275	2017	41.526.164
2013	20.520.709	2018	26.090.840

Pertumbuhan yang signifikan setelah dikeluarkannya kebijakan pelarangan kegiatan *transshipment*, menunjukkan *trend* positif. *Trend* sangat berkaitan dengan kebijakan pelabuhan tentang penghapusan biaya retribusi menjadi 0%. Produksi ikan yang dilelangkan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan total hasil tangkapan 50.253.204 kg. Hal ini membuktikan bahwasannya peraturan itu berdampak baik terhadap peningkatan produksi ikan yang dilelangkan di pelabuhan Muara Angke.

Perubahan peraturan *transshipment* bukan faktor utama yang membuat produksi ikan yang dilelangkan meningkat. Banyak faktor lain yang mendukung seperti menambahnya jumlah armada kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan Muara Angke. Dengan penghapusan biaya retribusi menjadikan tempat pelelangan ikan di pelabuhan Muara Angke menjadi pilihan untuk beberapa nelayan untuk meningkatkan pendapatannya.

4.3 Unit Penangkapan

Faktor utama yang membuat tempat pelelangan ikan (TPI) terus beroperasi adalah jumlah unit penangkapan. Karena semakin banyaknya kapal yang berlabuh di pelabuhan Muara Angke, akan berpengaruh terhadap produksi ikan yang dilelangkan setiap tahunnya. Total kapal yang terdaftar di pelabuhan Muara Angke adalah 1449 armada yang memiliki ukuran berbeda – beda, dan bisa dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Kapal Yang Tercatat Di Pelabuhan Muara Angke

No	Ukuran GT Kapal	Jumlah
1	6 - 10 GT	37
2	11 - 30 GT	1065
3	31- 60 GT	243
4	>60 GT	104

Selanjutnya untuk total alat tangkap yang terdaftar di pelabuhan Muara Angke berjumlah 1449 dengan jenis yang berbeda – beda, dan bisa dilihat pada tabel 8.

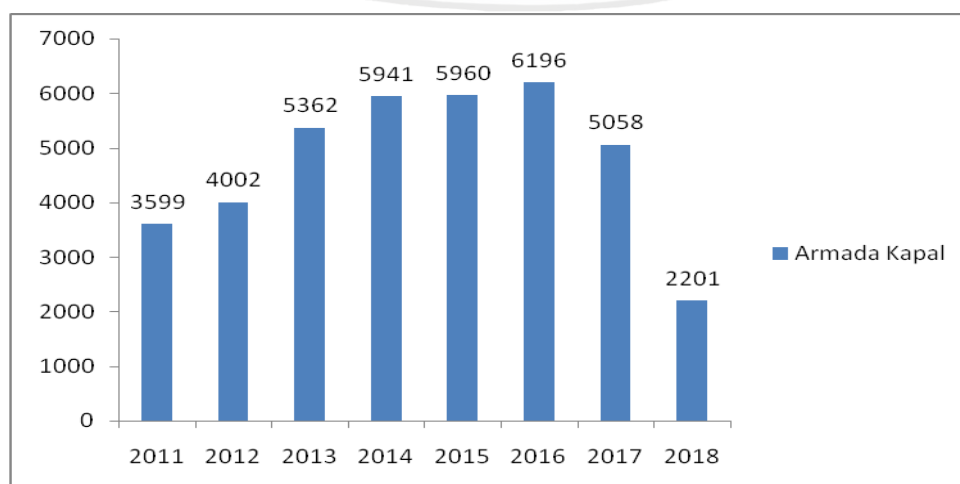
Tabel 8. Jumlah Alat Tangkap Yang Tercatat Di pelabuhan Muara Angke

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
1	Pancing Cumi	9
2	Long Line	8
3	Hand Line	31
4	Bubu	5
5	Purse Seine	125
6	Gill Net	156
7	Bouke Ami	1057
8	Angkutan	58

Dari total 1449 kapal di pelabuhan Muara Angke, yang sudah dilakukan pengukuran ulang berjumlah 965 kapal. Jika dilihat dari total keseluruhan, kapal yang sudah dilakukan pengukuran ulang sudah mencapai hasil 87,49% dari keseluruhan yang terdaftar di pelabuhan Muara Angke.

4.4 Jumlah Armada Kapal

Perubahan yang terjadi pada peraturan *transshipment* juga berdampak terhadap peningkatan armada kapal yang melakukan pendaratan ikan di pelabuhan Muara Angke. Dengan begitu kita bisa mengetahui bahwasannya akan terjadi peningkatan terhadap produksi ikan yang dilelangkan, dan bisa dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Jumlah Armada Kapal

Jika dilihat dari pertumbuhan jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan Muara Angke, jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya paling tinggi terjadi pada tahun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017 dikarenakan masih banyak kapal yang sedang dilakukan pengukuran ulang. Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwasannya perubahan peraturan yang dilakukan oleh menteri memberikan dampak yang baik bagi kegiatan pelelangan ikan di TPI pelabuhan Muara Angke. Grafik ini bisa juga sebagai faktor pendukung untuk menguatkan dampak positif yang diterima TPI terhadap perubahan peraturan *Transshipment*.

4.5 Strategi Pengembangan TPI dari dampak Pelarangan *Transshipment*

Kegiatan *transshipment* telah banyak merugikan pendapatan Negara. Salah satu akibatnya adalah tidak beroprasinya beberapa tempat pelelangan ikan di pelabuhan Indonesia dikarenakan hasil tangkapan banyak dijual pada saat kapal berada ditengah laut. Hal ini membuat produksi ikan di beberapa daerah mengalami penurunan.

4.5.1 Faktor Internal

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Adanya pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum

Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri kelautan dan perikanan kepada pihak pelabuhan, berfungsi untuk mengendalikan kegiatan perikanan. Dengan begitu, semua kegiatan di pelabuhan Muara Angke dapat berjalan secara tertib. Dan semua pelaku kegiatan akan merasa nyaman.

- b. Fasilitas di PPN Muara Angke sudah berfungsi secara optimal

Banyaknya fasilitas yang disediakan pelabuhan Muara Angke, telah memberikan kenyamanan untuk para nelayan dan pemilik kapal. Hasil tangkapan ikan juga dapat segera dipasarkan karena fasilitas yang ada

berfungsi secara normal. Berfungsinya fasilitas yang ada di pelabuhan bisa menjadi daya tarik beberapa nelayan untuk melabuhkan kapalnya.

c. Pengaruh biaya retribusi 0% terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan

Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan pemda No 3 tahun 2015 untuk mengubah biaya retribusi tempat pelelangan ikan dari 5% menjadi 0%. Tujuannya adalah menghilangkan beban yang diwajibkan kepada nelayan dan pembeli ikan. Kebijakan yang dikeluarkan menambah nilai tambah terhadap pelabuhan, untuk terus meningkatkan pelayanan.

d. Potensi pengembangan fasilitas PPN Muara Angke terhadap seluruh kegiatan pelabuhan

Pihak pelabuhan terus berupaya mengembangkan fasilitas yang ada agar semakin banyak kapal yang melakukan pendaratan hasil tangkapan dipelabuhan Muara Angke. Beberapa fasilitas sudah disediakan dengan perkembangan terakhir adalah pembaruan tempat pelelangan ikan yang makin besar. Agar tempat pelelangan ikan dapat menampung ikan lebih banyak.

e. Upaya penambahan fasilitas di PPN Muara Angke

Pemerintah provinsi DKI Jakarta selalu meninjau keadaan pelabuhan Muara Angke. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tentang apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang bisa dikembangkan oleh pelabuhan Muara Angke. Agar kedepannya pelabuhan Muara Angke dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

a. Pencemaran air (limbah) dalam kegiatan perikanan

Pihak pelabuhan masih belum menemukan solusi terbaik untuk limbah yang ada di pelabuhan Muara Angke. Pencemaran air limbah menjadi salah satu faktor pengganggu kenyamanan dalam berkegiatan di pelabuhan Muara Angke.

Hal ini selalu menjadi keresahan bagi seluruh pelaku perikanan di pelabuhan Muara Angke.



Gambar 8. Pencemaran limbah kegiatan perikanan

b. Pengelolaan pelelangan ikan yang kurang optimal di PPN Muara Angke

Pihak pelabuhan masih kesusahan dalam mengelola tempat pelelangan ikan. Apalagi dari segi juru lelang yang hanya ada satu orang, dan sangat kelelahan dalam melelang ikan yang begitu banyak. Kurangnya waktu pelelangan membuat pemilik kapal beralih ke tempat pendingin, untuk mencegah kualitas ikan menurun.

c. Kurangnya sistem kerja pengawas perikanan

Banyaknya preman di pelabuhan membuat kinerja pengawas pelabuhan banyak yang tergantikan. Hal ini membuat sistem kerja pengawas menurun. Karena banyak pelaku perikanan merasa kurang nyaman dengan adanya beberapa pekerjaan yang tergantikan oleh preman.

d. Perbedaan pengelola kantor TPI dengan kantor pelabuhan

Kurangnya pegawai kantor tempat pelelangan ikan (TPI) yang ada di pelabuhan menjadikan sistem pencatatan ikan sangat lambat untuk dilaporkan ke kantor pelabuhan. Hal ini membuat data produksi terhambat untuk dipublikasikan.

e. Terbatasnya anggaran dana terhadap fasilitas

Perubahan biaya retribusi di tempat pelelangan ikan (TPI) menjadi 0%. Membuat pihak pelabuhan sedikit mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Hal ini berpengaruh terhadap pengembangan atau penambahan fasilitas.

Matriks internal untuk menggambarkan keadaan status penangan TPI yang terkena dampak *transshipment*. Nilai yang di dapatkan dari kekuatan seberkas 1.956 dan nilai yang didapatkan dari kelemahan sebesar 0.791. hal ini membuktikan bahwa hasil kekuatan lebih tinggi 1.1649 dari kelemahan yang dimiliki. Seperti pada Table 9.

Tabel 9. Matriks Kekuatan dan Kelemahan

Faktor Strategi Kekuatan (S)	Bobot	Rating	Skor
1.Adanya pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum	0.143	4	0.572
2.Fasilitas di PPN Muara Angke sudah berfungsi secara optimal	0.108	3	0.325
3.Pengaruh biaya retribusi 0% terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan	0.121	3	0.363
4.Potensi pengembangan fasilitas PPN Muara Angke terhadap seluruh kegiatan pelabuhan	0.112	3	0.336
5.Upaya penambahan fasilitas di PPN Muara Angke	0.12	3	0.36
Jumlah	0.604	16	1.956
Faktor strategi Kelemahan (W)			
1. Pencemaran air (limbah) dalam kegiatan perikanan	0.079	2	0.157
2.Pengelolaan pelelangan ikan yang kurang optimal di PPN Muara Angke	0.085	2	0.17
3.Kurangnya sistem kerja pengawas perikanan	0.076	2	0.152
4.Perbedaan pengelola kantor TPI dengan kantor pelabuhan	0.076	2	0.152
5.Terbatasnya anggaran dana terhadap fasilitas	0.08	2	0.16
Jumlah	0.396	10	0.791
Total	1		1.1649

4.5.2 Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

a. Potensi sumberdaya ikan yang didaratkan ke PPN Muara Angke

Adanya perubahan peraturan tentang pelarangan *transshipment*, produksi ikan di pelabuhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa sumberdaya perikanan di Indonesia masih memiliki cadangan yang melimpah.

b. Perkembangan teknologi penangkapan ikan oleh kapal

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, selalu mengkaji alat tangkap yang sudah ada. Tujuannya untuk memperbaiki agar alat tangkap menjadi efektif dan selektif. Agar menghasilkan kualitas ikan yang baik untuk di pasarkan tanpa merusak lingkungan.

c. Permintaan pasar terhadap ikan hasil tangkapan

Tingginya permintaan ikan yang ada di daerah Jakarta, mengakibatkan banyak kapal yang ingin mendaratkan hasil tangkapannya untuk didaratkan di pelabuhan Muara Angke. Permintaan pasar yang tinggi juga menjadi peluang bagi nelayan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

d. Akses jalan dan transportasi

Mudahnya akses jalan yang diberikan pihak pelabuhan dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, menunjukan bentuk kepedulian penyedia jasa untuk memberikan daya tarik terhadap pengunjung. Dengan mudah masyarakat dapat mengakses transportasi umum atau milik pribadi untuk menuju pelabuhan Muara Angke.

e. Pengaruh PPN Muara Angke terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat

Pelabuhan Muara Angke memberikan Banyak kesempatan terhadap masyarakat sekitar pelabuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini sangat

berpengaruh untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Salah satu contohnya adalah sebagai pengantar ikan dari tempat pelelangan ikan ke pasar ikan untuk dipasarkan.

2. Ancaman (*Threats*)

a. Sumberdaya Manusia pelaku perikanan kurang memenuhi peraturan

Banyaknya orang-orang dalam melakukan kegiatan di pelabuhan, tapi masih belum mematuhi peraturan yang ada. Seperti hal melaporkan kedatangan kapal yang tidak sesuai dengan hari kedatangannya. Pelanggaran ini dapat menimbulkan kecurangan jumlah hasil tangkapan.

b. Pengaruh *illegal fishing* terhadap hasil tangkapan

Adanya beberapa kapal yang masih melakukan *transshipment* di tengah laut, dikarenakan minimnya armada kapal yang dimiliki oleh pihak pelabuhan pada saat patroli laut. Hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan alat tangkap juga menjadi ancaman bagi pelabuhan untuk memenuhi permintaan pasar.

c. Menurunnya pendapatan pokok pemerintah provinsi di PPN Muara Angke untuk penambahan fasilitas

Hilangnya biaya retribusi ditempat pelelangan ikan (TPI), membuat pemerintah provinsi harus melakukan perencanaan jangka panjang untuk melakukan penambahan fasilitas. Hal ini membuat penambahan fasilitas menjadi terhambat peningkatannya.

d. Banyaknya kapal yang tidak sesuai dengan surat izin yang dimiliki

Kapal yang tidak memiliki ukuran yang sesuai dengan surat izinnya, membuat pemerintah pusat melakukan pengukuran ulang ukuran kapal. Kapal yang tidak sesuai dengan surat dokumennya, akan dipersulit untuk mendapatkan izin berlayar. Ini menjadi sebuah ancaman untuk tempat

pelelangan ikan, karena banyaknya kapal yang tidak melakukan penangkapan berpengaruh terhadap menurunnya produksi yang dilelangkan.

e. Sistem pemasaran ikan di PPN Muara Angke

Kedekatan pelanggan dengan nelayan atau pemilik kapal, mengakibatkan hasil tangkapan sudah banyak yang dipesan. Perilaku ini membuat tempat pelelangan ikan beralih fungsi menjadi tempat pemasaran ikan. Dampak yang diterima adalah beberapa pembeli akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan ikan ditempat pelelangan.

Matriks eksternal untuk menggambarkan keadaan status penangan TPI yang terkena dampak *transshipment*. Nilai yang di dapatkan dari peluang sebesar 1.828 dan nilai yang didapatkan dari kelemahan sebesar 0.781. hal ini membuktikan bahwa hasil kekuatan lebih tinggi 1.0464 dari kelemahan yang dimiliki. Seperti pada Tabel 10

Tabel 10. Matriks Peluang dan Ancaman

Faktor Strategi Peluang (O)	Bobot	Rating	Skor
1.Potensi sumberdaya ikan yang didaratkan ke PPN Muara Angke	0.130	3	0.389
2.Perkembangan teknologi penangkapan ikan oleh kapal	0.127	3	0.381
3.Permintaan pasar terhadap ikan hasil tangkapan	0.120	3	0.361
4.Akses jalan dan transportasi	0.112	3	0.336
5.Pengaruh PPN Muara Angke terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat	0.120	3	0.361
Jumlah	0.609	15	1.828
Faktor strategi Ancaman (T)			
1.Sumberdaya Manusia pelaku perikanan kurang memenuhi peraturan	0.079	2	0.158
2.Pengaruh ilegal fishing terhadap hasil tangkapan	0.072	2	0.145
3.Menurunnya pendapatan pokok pemerintah provinsi di PPN Muara Angke untuk penambahan fasilitas	0.078	2	0.156
4.Banyaknya kapal yang tidak sesuai dengan surat izin yang dimiliki	0.072	2	0.145
5.Sistem pemasaran ikan di PPN Muara Angke	0.089	2	0.178
Jumlah	0.391	10	0.781
Total	1		1.0464

Cara yang digunakan untuk menentukan titik koordinat kuadran adalah hasil dari pengurangan masing-masing faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman). Hasil dari pengurangan masing-masing faktor akan dijadikan titik koordinat. Faktor internal yaitu kekuatan dikurangi dengan kelemahan yang nantinya nilai akan dijadikan titik koordinat x. Faktor eksternal yaitu peluang dikurangi dengan ancaman yang nantinya nilai akan dijadikan titik koordinat y. Proses perhitungan kuadran untuk mencari sumbu x dan sumbu y :

$$X = \text{Kekuatan (S)} - \text{Kelemahan (W)}$$

$$= 1,956 - 0,791$$

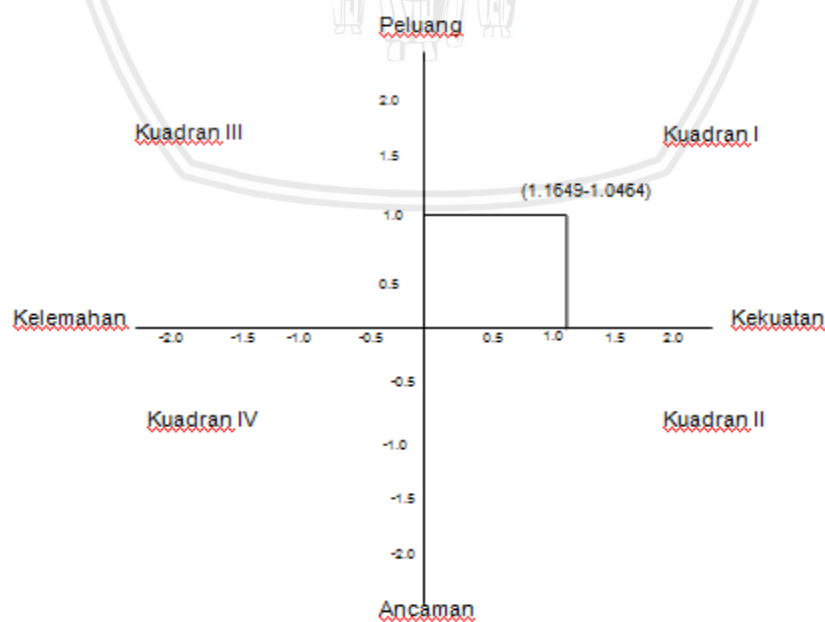
$$= 1,1649$$

$$Y = \text{Peluang (O)} - \text{Ancaman (T)}$$

$$= 1,828 - 0,781$$

$$= 1,0464$$

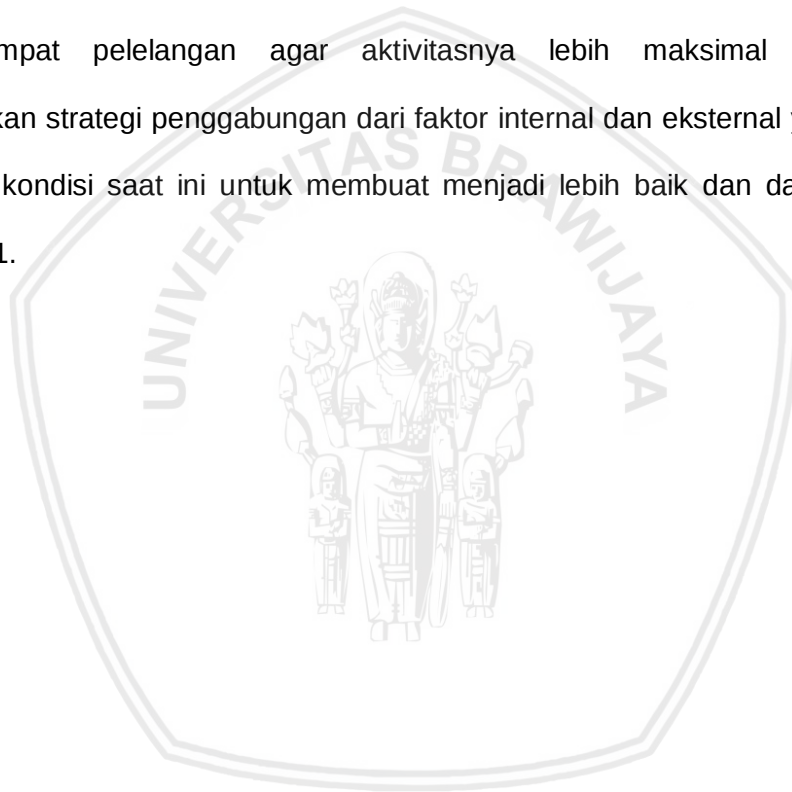
Dari hasil perhitungan didapatkan nilai $x=1,1649$ dan nilai $y=1,0464$, jika dimasukkan kedalam table matriks SWOT berada pada kuadran 1 seperti pada gambar 8.



Gambar 9. Grafik Kuadran

Grafik kuadran 1 menunjukkan bahwa tempat pelelangan ikan memiliki peluang dan kekuatan untuk bisa terus beroperasi dan meningkatkan produksi ikan yang dilelangkan, dengan begitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pelarangan *transshipment* dapat berjalan dengan lancar di pelabuhan Muara Angke. Dengan situasi yang menguntungkan ini, pelabuhan Muara Angke dapat menerapkan strategi untuk meningkatkan produksi ikan agar tempat pelelangan ikan tetap beroperasi dan kebutuhan pasar akan tercukupi.

Untuk membuat peraturan pelarangan *transshipment* lebih berpengaruh terhadap tempat pelelangan agar aktivitasnya lebih maksimal maka di rekomendasikan strategi penggabungan dari faktor internal dan eksternal yang akan memperbaiki kondisi saat ini untuk membuat menjadi lebih baik dan dapat dilihat pada Tabel 11.



Tabel 11. Matrik SWOT IFAS dan EFAS

EFAS / IFAS	Strengths (S) 1. Adanya pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum 2. Fasilitas di PPN Muara Angke sudah berfungsi secara optimal 3. Pengaruh biaya retribusi 0% terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan 4. Potensi pengembangan fasilitas PPN Muara Angke terhadap seluruh kegiatan pelabuhan 5. Upaya penambahan fasilitas di PPN Muara Angke	Weaknesses (W) 1. Pencemaran air (limbah) dalam kegiatan perikanan 2. Pengelolaan pelelangan ikan yang kurang optimal di PPN Muara Angke 3. Kurangnya sistem kerja pengawas perikanan 4. Perbedaan pengelola kantor TPI dengan kantor pelabuhan 5. Terbatasnya anggaran dana terhadap fasilitas
Opportunities (O) 1. Potensi sumberdaya ikan yang didaratkan ke PPN Muara Angke 2. Perkembangan teknologi penangkapan ikan oleh kapal 3. Permintaan pasar terhadap ikan hasil tangkapan 4. Akses jalan dan transportasi 5. Pengaruh PPN Muara Angke terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat	SO 1. Meningkatkan Kontrol untuk hasil tangkapan yang lebih baik 2. Memanfaatkan fasilitas yang ada dan terus melakukan pembaruan 3. Penghapusan biaya retribusi menjadi 0% dapat meningkatkan permintaan pasar 4. Akses jalan yang mudah membuat pelabuhan bisa mengembangkan fasilitas yang ada	WO 1. Menjaga kebersihan tempat pelelangan ikan agar hasil tangkapan tidak menurun kualitasnya 2. Memaksimalkan pengelolaan perikanan agar produksi tetap stabil 3. Memperbaiki sistem kerja pengawas 4. Menyamakan pengelolaan kantor tpi dan pelabuhan
Threats (T) 1. Sumberdaya Manusia pelaku perikanan kurang memenuhi peraturan 2. Pengaruh ilegal fishing terhadap hasil tangkapan 3. Menurunnya pendapatan pokok pemerintah provinsi di PPN Muara Angke untuk penambahan fasilitas 4. Banyaknya kapal yang tidak sesuai dengan surat izin yang dimiliki 5. Sistem pemasaran ikan di PPN Muara Angke	ST 1. Merubah beberapa SDM yang belum tertib dengan pengawasan detail 2. Fasilitas yang ada bisa untuk menjaga mutu hasil tangkapan 3. Penghapusan biaya retribusi membuat pendapatan menurun 4. Melakukan penambahan fasilitas agar tempat pelelangan ikan tidak beralih jadi tempat pemasaran ikan	WT 1. Sumberdaya manusia kurang memenuhi peraturan yang mengakibatkan pencemaran limbah 2. Pengelolaan yang belum maksimal dapat membuat produksi tidak stabil 3. Meningkatkan koordinasi agar dapat bekerja sama dengan baik 4. Menurunnya anggaran dana untuk melakukan penambahan fasilitas

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Produksi ikan yang dilelangkan mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2009 sampai 2018. Pada tahun-tahun sebelum dilarang kegiatan *transshipment*, produksi ikan stabil. Pada kisaran terendah tahun 2010 dengan jumlah 10.432.428 Kg pertahun dan produksi tertinggi tahun 2013 dengan jumlah 20.520.709. Pada tahun-tahun berikutnya setelah kegiatan *transshipment* dilarang produksi ikan mengalami peningkatan yang signifikan, pada kisaran terendah tahun 2014 dengan jumlah 24.574.079 dan produksi tertinggi tahun 2016 dengan jumlah 50.253.204.
2. Dampak yang diberikan oleh pemerintah tentang pelarangan *transshipment* di perairan Indonesia sangat berpengaruh baik terhadap kegiatan tempat pelelangan ikan, hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun.
3. Rekomendasi strategi yang diberikan kepada pihak pelabuhan adalah pertama, Mendukung kebijakan yang dikeluarkan Pemprov tentang biaya retribusi 0% di PPN Muara Angke. Kedua, selalu berupaya untuk melakukan pembaruan atau penambahan fasilitas yang ada di PPN Muara Angke.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus sering melakukan kunjungan terhadap pelabuhan kecil untuk mengetahui apa saja peraturan yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali tempat pelelangan ikan agar kembali beroperasi dan harga ikan dipasar dapat terkendali.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang apa saja yang mengakibatkan banyaknya tempat pelelangan ikan berhenti beroperasi di berbagai daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul QJ dan Udiyo B. 2014. *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. *Jurnal Supremasi Hukum*. **1** (26): 169-191.
- Amelia H dan Tiwi NU. 2017. Analisis Kebijakan Larangan *Transshipment* (Alih Muat) Tangkapan Perikanan Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan Kapal Long Line (Studi Kasus Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman DKI Jakarta). *Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*. **5** (1): 78 – 89.
- Amelya G. 2014. Analisis *Transshipment* Pasal 69 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap. *Jurnal Dinamika Hukum*. **14** (2): 340-349.
- Arthatiani FY. 2014. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus *IUU Fishing* Di Indonesia. *Jurnal Widyariset*. **17** (1): 1-12.
- Bendar A. 2015. *Illegal Fishing* Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa. Abstrak Perspektif Hukum. **15** (1): 1-26.
- Daft RL. 2010. Era Baru Manajemen. Salemba Empat. Jakarta.
- Dewinta R. 2014. Penerapan Biaya Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Membeli Atau Memproduksi Sendiri Pada Rumah Makan Pangsit Tompaso. *Jurnal EMBA*. **2** (3): 30-37.
- Dwiyanto D. 2006. Metode Kualitatif; Penerapannya Dalam Penelitian. www.inparametric.com
- Eneng N. 2012. Kajian Awal Pengelolaan Sanitasi Tempat Pelelangan Ikan Berstandar International : Kasus PPS Nizam Zachman Jakarta. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor.
- Febrianto Reza Kukuh, Abdul Kohar Mudzakir, Abdul Rosyid. 2015. Peningkatan Kapasitas Fasilitas Fungsional melalui Program Minapolitan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Sosial ekonomi Kelautan dan Perikan*. **5** (2) Tahun 2015.
- Nanda KS. 2010. Peran Pelabuhan Perikanan Samudera (Pps) Nizam Zachman Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Produksi Perikanan Tangkap di Dki Jakarta. Skripsi. FPIK. IPB. Bogor.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.26/MEN/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:

PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pramitasari SD. 2005. Analisis Efisiensi Tpi (Tempat Pelelangan Ikan) Kelas 1,2, Dan 3 di Jawa Tengah Dan Pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. Tesis. UNDIP. Semarang.

Purnomosidhi B. 2005. Analisis Empiris Terhadap Diterminan Praktik Pengungkapan Modal Intelektual Pada Perusahaan Publik di Bej. *Jurnal Riset Akuntan Indonesia*. **9** (1): 1-25.

Rangkuti F. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 200 hlm.

Seng H. 2012. Peramalan Data IHSG Menggunakan *Fuzzy Time Series*. *Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems*. **6** (2): 79-88.

Sugiono. 2009. Memahami Penelitian Kuantitatif. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Usmawadi A. 2013. Penegakan Hukum *IUU Fishing* Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case). *Jurnal Opinio Juris*. (12):68-92.

Yudi DP. 2015. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Naskah Publikasi Jurnal. 1-23.

Zuhrotun N. 2014. Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal EKBIS*. **9** (2): 468-476.

Lampiran

Lampiran 1. Perhitungan SWOT

1. Kekuatan

RATING									
NO	NAMA RESPONDEN	PEKERJAAN	PARAMETER						
			1	2	3	4	5		
1	A.Waldi.P	Waski	4	3	4	3	2	Total	
2	Rubiyat	Petugas	4	3	4	4	4		
3	Sumantri	Psdkp	3	2	3	2	3		
4	Panji Sadewo	Kesyahbandaran	4	3	3	4	4		
5	Darmanto	Nahkoda	4	2	3	3	3		
6	Daswan	Nelayan	4	2	3	3	3		
7	M.Taifuri	Nelayan	4	3	4	3	4		
8	Badri	Nelayan	4	2	3	3	3		
9	Iwan Fardiansah	Pengurus Kapal	3	3	3	3	2		
10	H.A.Mulyono	Nelayan	4	4	4	3	3		
11	Warnoto	Nelayan	4	3	2	4	2		
12	Andri	Nelayan	4	4	2	2	4		
13	Jaya	Nelayan	4	4	3	4	4		
14	Saepul K	Nelayan	4	3	3	3	4		
15	Tasirin	Nelayan	4	2	3	3	3		
16	Satya Lesmana	Waski	4	3	4	3	4		
17	Kusnan	Nelayan	3	2	2	3	3		
18	Jaenal Abidin	Wiraswasta	4	3	4	2	3		
19	Maun	Petugas	4	3	4	3	3		
20	Falah	Psdkp	4	3	4	3	4		
21	Ali Mujib	Pengolah Ikan	4	2	1	2	2		
22	Rizal	Nelayan	4	2	4	3	3		
23	Ishak Azi Alanawa	Pedagang	4	2	2	3	3		
24	Dulloh Said	Pengolah ikan	3	3	4	3	3		
25	Sutejo	Pengolah Ikan	4	2	3	3	3		
26	Sarwo	Pengolah Ikan	3	3	3	3	3		
27	Tepo	Pedagang	3	4	2	3	2		
28	Yatno	Pedagang	3	3	3	2	3		
29	Anjas	Peserta Lelang	3	3	3	2	3		
30	Lukman	Peserta Lelang	3	3	4	2	3		
		Jumlah	111	84	94	87	93	Total	469
		Bobot	3.7	2.8	3.13	2.9	3.1		15.6
		Nilai Ifas Ancaman	4	3	3	3	3		16

PEMBOBOTAN									
NO	NAMA RESPONDEN	PEKERJAAN	PARAMETER						
			1	2	3	4	5		
1	A.Waldi.P	waski	4	3	4	3	2		
2	Rubiyat	Petugas	4	3	4	4	4		
3	Sumantri	Psdkp	3	2	3	2	3		
4	Panji Sadewo	Kesyahbandaran	4	3	3	4	4		
5	Darmanto	Nahkoda	4	2	3	3	3		
6	Daswan	Nelayan	4	2	3	3	3		
7	M.Taifuri	Nelayan	4	3	4	3	4		
8	Badri	Nelayan	4	2	3	3	3		
9	Iwan Fardiansah	Pengurus Kapal	3	3	3	3	2		
10	H.A.Mulyono	Nelayan	4	4	4	3	3		
11	Warnoto	Nelayan	4	3	2	4	2		
12	Andri	Nelayan	4	4	2	2	4		
13	Jaya	Nelayan	4	4	3	4	4		
14	Saepul K	Nelayan	4	3	3	3	4		
15	Tasirin	Nelayan	4	2	3	3	3		
16	Satya Lesmana	waski	4	3	4	3	4		
17	Kusnan	Nelayan	3	2	2	3	3		
18	Jaenal Abidin	Wiraswasta	4	3	4	2	3		
19	Maun	Petugas	4	3	4	3	3		
20	Falah	Psdkp	4	3	4	3	4		
21	Ali Mujib	Pengolah Ikan	4	2	1	2	2		
22	Rizal	Nelayan	4	2	4	3	3		
23	Ishak Azi Alanawa	Pedagang	4	2	2	3	3		
24	Dulloh Said	Pengolah ikan	3	3	4	3	3		
25	Sutejo	Pengolah Ikan	4	2	3	3	3		
26	Sarwo	Pengolah Ikan	3	3	3	3	3		
27	Tepo	Pedagang	3	4	2	3	2		
28	Yatno	Pedagang	3	3	3	2	3		
29	Anjas	Peserta Lelang	3	3	3	2	3		
30	Lukman	Peserta Lelang	3	3	4	2	3		
		Jumlah	111	84	94	87	93	Total	469
		Bobot	0,24	0,18	0,20	0,19	0,20		1
		Nilai Ifas Ancaman	0,14	0,11	0,12	0,11	0,12		0,60

2. Kelemahan

RATING									
NO	NAMA 'RESPONDEN	PEKERJAAN	PARAMETER						
			1	2	3	4	5		
1	A.Waldi.P	Waski	2	2	2	1	1		
2	Rubiyat	Petugas	1	2	2	1	1		
3	Sumantri	Psdkp	3	2	2	2	2		
4	Panji Sadewo	Kesyahbandaran	2	2	2	1	2		
5	Darmanto	Nahkoda	1	3	1	2	2		
6	Daswan	Nelayan	1	3	1	2	2		
7	M.Taifuri	Nelayan	1	3	2	2	2		
8	Badri	Nelayan	1	3	2	3	3		
9	Iwan Fardiansah	Pengurus kapal	4	2	2	2	2		
10	H.A.Mulyono	Nelayan	4	3	2	2	1		
11	Warnoto	Nelayan	1	2	1	3	2		
12	Andri	Nelayan	1	1	1	3	3		
13	Jaya	Nelayan	2	1	2	3	2		
14	Saepul K	Nelayan	2	3	2	1	2		
15	Tasirin	Nelayan	4	2	2	2	2		
16	Satya Lesmana	waski	3	2	2	2	2		
17	Kusnan	Nelayan	1	2	2	1	2		
18	Jaenal Abidin	Wiraswasta	3	1	2	2	3		
19	Maun	Petugas	1	2	2	2	2		
20	Falah	Psdkp	2	2	1	2	2		
21	Ali Mujib	Pengolah Ikan	2	2	3	2	3		
22	Rizal	Nelayan	1	3	3	2	3		
23	Ishak Azi Alanawa	Pedagang	1	2	4	1	1		
24	Dulloh Said	Pengolah ikan	3	2	2	2	2		
25	Sutejo	Pengolah Ikan	3	2	2	2	2		
26	Sarwo	Pengolah Ikan	2	3	2	2	2		
27	Tepo	Pedagang	2	2	2	2	2		
28	Yatno	Pedagang	3	2	2	2	2		
29	Anjas	Peserta Lelang	2	2	2	2	3		
30	Lukman	Peserta Lelang	2	3	2	3	2		
		Jumlah	61	66	59	59	62	Total	307
		Bobot	2,0	2,2	2,0	2,0	2,1		10,2
		Nilai Ifas Ancaman	2	2	2	2	2		10

PEMBOBOTAN									
NO	NAMA RESPONDEN	PEKERJAAN	PARAMETER						
			1	2	3	4	5		
1	A.Waldi.P	waski	2	2	2	1	1		
2	Rubiyat	Petugas	1	2	2	1	1		
3	Sumantri	Psdkp	3	2	2	2	2		
4	Panji Sadewo	Kesyahbandaran	2	2	2	1	2		
5	Darmanto	Nahkoda	1	3	1	2	2		
6	Daswan	Nelayan	1	3	1	2	2		
7	M.Taifuri	Nelayan	1	3	2	2	2		
8	Badri	Nelayan	1	3	2	3	3		
9	Iwan Fardiansah	Pengurus kapal	4	2	2	2	2		
10	H.A.Mulyono	Nelayan	4	3	2	2	1		
11	Warnoto	Nelayan	1	2	1	3	2		
12	Andri	Nelayan	1	1	1	3	3		
13	Jaya	Nelayan	2	1	2	3	2		
14	Saepul K	Nelayan	2	3	2	1	2		
15	Tasirin	Nelayan	4	2	2	2	2		
16	Satya Lesmana	waski	3	2	2	2	2		
17	Kusnan	Nelayan	1	2	2	1	2		
18	Jaenal Abidin	Wiraswasta	3	1	2	2	3		
19	Maun	Petugas	1	2	2	2	2		
20	Falah	Psdkp	2	2	1	2	2		
21	Ali Mujib	Pengolah Ikan	2	2	3	2	3		
22	Rizal	Nelayan	1	3	3	2	3		
23	Ishak Azi Alanawa	Pedagang	1	2	4	1	1		
24	Dulloh Said	Pengolah ikan	3	2	2	2	2		
25	Sutejo	Pengolah Ikan	3	2	2	2	2		
26	Sarwo	Pengolah Ikan	2	3	2	2	2		
27	Tepo	Pedagang	2	2	2	2	2		
28	Yatno	Pedagang	3	2	2	2	2		
29	Anjas	Peserta Lelang	2	2	2	2	3		
30	Lukman	Peserta Lelang	2	3	2	3	2		
		Jumlah	61	66	59	59	62	Total	307
		Bobot	0,20	0,21	0,19	0,19	0,20		1
		Nilai Ifas Ancaman	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08		0,40

3. Peluang

RATING									
NO	NAMA RESPONDEN	PEKERJAAN	PARAMETER						
			1	2	3	4	5		
1	A.Waldi.P	Waski	4	3	1	2	3		
2	Rubiyat	Petugas	4	3	3	4	4		
3	Sumantri	Psdkp	3	3	3	3	3		
4	Panji Sadewo	Kesyahbandaran	3	3	3	3	3		
5	Darmanto	Nahkoda	4	4	4	2	3		
6	Daswan	Nelayan	4	4	4	2	3		
7	M.Taifuri	Nelayan	3	4	3	3	4		
8	Badri	Nelayan	4	3	2	3	4		
9	Iwan Fardiansah	Pengurus Kapal	2	3	3	3	3		
10	H.A.Mulyono	Nelayan	4	4	2	2	3		
11	Warnoto	Nelayan	2	4	2	3	3		
12	Andri	Nelayan	3	3	2	2	2		
13	Jaya	Nelayan	4	3	2	4	3		
14	Saepul K	Nelayan	2	3	4	1	2		
15	Tasirin	Nelayan	4	3	3	3	3		
16	Satya Lesmana	Waski	3	3	4	3	4		
17	Kusnan	Nelayan	4	4	4	2	2		
18	Jaenal Abidin	Wiraswasta	4	3	2	3	2		
19	Maun	Petugas	3	3	4	3	4		
20	Falah	Psdkp	4	3	4	3	3		
21	Ali Mujib	Pengolah Ikan	2	3	3	3	1		
22	Rizal	Nelayan	3	2	4	3	4		
23	Ishak Azi Alanawa	Pedagang	2	2	4	1	2		
24	Dulloh Said	Pengolah ikan	3	3	2	3	3		
25	Sutejo	Pengolah Ikan	3	3	3	3	3		
26	Sarwo	Pengolah Ikan	3	2	3	3	3		
27	Tepo	Pedagang	3	3	2	3	3		
28	Yatno	Pedagang	2	3	3	3	3		
29	Anjas	Peserta Lelang	3	3	3	3	2		
30	Lukman	Peserta Lelang	3	3	2	3	3		
		Jumlah	95	93	88	82	88	Total	446
		Bobot	3,2	3,1	2,9	2,7	2,9		14,9
		Nilai Efas Ancaman	3	3	3	3	3		15

PEMBOBOTAN									
NO	NAMA RESPONDEN	PEKERJAAN	PARAMETER						
			1	2	3	4	5		
1	A.Waldi.P	waski	4	3	1	2	3		
2	Rubiyat	Petugas	4	3	3	4	4		
3	Sumantri	Psdkp	3	3	3	3	3		
4	Panji Sadewo	Kesyahbandaran	3	3	3	3	3		
5	Darmanto	Nahkoda	4	4	4	2	3		
6	Daswan	Nelayan	4	4	4	2	3		
7	M.Taifuri	Nelayan	3	4	3	3	4		
8	Badri	Nelayan	4	3	2	3	4		
9	Iwan Fardiansah	Pengurus Kapal	2	3	3	3	3		
10	H.A.Mulyono	Nelayan	4	4	2	2	3		
11	Warnoto	Nelayan	2	4	2	3	3		
12	Andri	Nelayan	3	3	2	2	2		
13	Jaya	Nelayan	4	3	2	4	3		
14	Saepul K	Nelayan	2	3	4	1	2		
15	Tasirin	Nelayan	4	3	3	3	3		
16	Satya Lesmana	waski	3	3	4	3	4		
17	Kusnan	Nelayan	4	4	4	2	2		
18	Jaenal Abidin	Wiraswasta	4	3	2	3	2		
19	Maun	Petugas	3	3	4	3	4		
20	Falah	Psdkp	4	3	4	3	3		
21	Ali Mujib	Pengolah Ikan	2	3	3	3	1		
22	Rizal	Nelayan	3	2	4	3	4		
23	Ishak Azi Alanawa	Pedagang	2	2	4	1	2		
24	Dulloh Said	Pengolah ikan	3	3	2	3	3		
25	Sutejo	Pengolah Ikan	3	3	3	3	3		
26	Sarwo	Pengolah Ikan	3	2	3	3	3		
27	Tepo	Pedagang	3	3	2	3	3		
28	Yatno	Pedagang	2	3	3	3	3		
29	Anjas	Peserta Lelang	3	3	3	3	2		
30	Lukman	Peserta Lelang	3	3	2	3	3		
		Jumlah	95	93	88	82	88	Total	446
		Bobot	0,21	0,21	0,20	0,18	0,20		1
		Nilai Efas Ancaman	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12		0,61

4. Ancaman

RATING									
NO	NAMA RESPONDEN	PEKERJAAN	PARAMETER						
			1	2	3	4	5		
1	A.Waldi.P	waski	2	1	2	1	2		
2	Rubiyat	Petugas	2	1	1	1	2		
3	Sumantri	Psdkp	3	2	2	2	3		
4	Panji Sadewo	Kesyahbandaran	2	2	1	1	2		
5	Darmanto	Nahkoda	2	1	2	1	2		
6	Daswan	Nelayan	2	1	2	1	2		
7	M.Taifuri	Nelayan	2	2	1	3	1		
8	Badri	Nelayan	2	1	2	3	2		
9	Iwan Fardiansah	Pengurus kapal	2	2	2	2	2		
10	H.A.Mulyono	Nelayan	2	3	3	2	2		
11	Warnoto	Nelayan	1	2	1	2	2		
12	Andri	Nelayan	1	1	2	3	3		
13	Jaya	Nelayan	2	2	2	1	2		
14	Saepul K	Nelayan	1	4	1	1	2		
15	Tasirin	Nelayan	1	1	1	1	2		
16	Satya Lesmana	waski	2	2	2	2	2		
17	Kusnan	Nelayan	1	1	3	1	2		
18	Jaenal Abidin	Wiraswasta	3	2	2	1	2		
19	Maun	Petugas	2	1	2	2	2		
20	Falah	Psdkp	2	1	2	1	2		
21	Ali Mujib	Pengolah Ikan	3	2	4	3	3		
22	Rizal	Nelayan	2	3	1	1	3		
23	Ishak Azi Alanawa	Pedagang	1	1	3	2	3		
24	Dulloh Said	Pengolah ikan	2	2	2	2	2		
25	Sutejo	Pengolah Ikan	2	2	2	2	2		
26	Sarwo	Pengolah Ikan	3	2	3	2	3		
27	Tepo	Pedagang	2	2	2	3	2		
28	Yatno	Pedagang	2	2	1	2	2		
29	Anjas	Peserta Lelang	2	2	2	2	2		
30	Lukman	Peserta Lelang	2	2	1	2	2		
		Jumlah	58	53	57	53	65	Total	286
		Bobot	1,9	1,8	1,9	1,8	2,2		9,53
		Nilai Efas Ancaman	2	2	2	2	2		10

PEMBOBOTAN									
NO	NAMA RESPONDEN	PEKERJAAN	PARAMETER						
			1	2	3	4	5		
1	A.Waldi.P	Waski	2	1	2	1	2		
2	Rubiyat	Petugas	2	1	1	1	2		
3	Sumantri	Psdkp	3	2	2	2	3		
4	Panji Sadewo	Kesyahbandaran	2	2	1	1	2		
5	Darmanto	Nahkoda	2	1	2	1	2		
6	Daswan	Nelayan	2	1	2	1	2		
7	M.Taifuri	Nelayan	2	2	1	3	1		
8	Badri	Nelayan	2	1	2	3	2		
9	Iwan Fardiansah	Pengurus kapal	2	2	2	2	2		
10	H.A.Mulyono	Nelayan	2	3	3	2	2		
11	Warnoto	Nelayan	1	2	1	2	2		
12	Andri	Nelayan	1	1	2	3	3		
13	Jaya	Nelayan	2	2	2	1	2		
14	Saepul K	Nelayan	1	4	1	1	2		
15	Tasirin	Nelayan	1	1	1	1	2		
16	Satya Lesmana	Waski	2	2	2	2	2		
17	Kusnan	Nelayan	1	1	3	1	2		
18	Jaenal Abidin	Wiraswasta	3	2	2	1	2		
19	Maun	Petugas	2	1	2	2	2		
20	Falah	Psdkp	2	1	2	1	2		
21	Ali Mujib	Pengolah Ikan	3	2	4	3	3		
22	Rizal	Nelayan	2	3	1	1	3		
23	Ishak Azi Alanawa	Pedagang	1	1	3	2	3		
24	Dulloh Said	Pengolah ikan	2	2	2	2	2		
25	Sutejo	Pengolah Ikan	2	2	2	2	2		
26	Sarwo	Pengolah Ikan	3	2	3	2	3		
27	Tepo	Pedagang	2	2	2	3	2		
28	Yatno	Pedagang	2	2	1	2	2		
29	Anjas	Peserta Lelang	2	2	2	2	2		
30	Lukman	Peserta Lelang	2	2	1	2	2		
		Jumlah	58	53	57	53	65	Total	286
		Bobot	0,20	0,19	0,20	0,19	0,23		1
		Nilai Efas Ancaman	0,08	0,07	0,08	0,07	0,09		0,391

Lampiran 2. Kuisisioner Rating

KUISISIONER RATING

Nama :
Pekerjaan :
Petunjuk :

Pilihlah jawaban sesuai dengan pendapat bapak/ibu/saudara/i terhadap jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda (X) disetiap pertanyaan dibawah ini :

Faktor Internal

• Kekuatan (Strengths)

1. Bagaimana pentingnya pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum pada PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Sedang
 - d. Tidak penting
2. Apakah fasilitas yang ada di PPN Muara Angke sudah berfungsi optimal secara keseluruhan ?
 - a. Sangat berfungsi
 - b. Berfungsi
 - c. Sedang
 - d. Tidak berfungsi
3. Bagaimana pengaruh biaya retribusi 0% terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh
4. Bagaimana potensi pengembangan fasilitas di PPN Muara Angke terhadap seluruh kegiatan pelabuhan ?
 - a. Sangat berpotensi
 - b. Berpotensi
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpotensi
5. Bagaimana upaya pemerintah dalam penambahan fasilitas di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat berupaya
 - b. Berupaya
 - c. Sedang
 - d. Tidak berupaya

• Kelemahan (Weakness)

1. Bagaimana pengaruh pencemaran air (Limbah) dalam kegiatan perikanan di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh
2. Bagaimana sistem pengolahan pelelangan ikan di PPN Muara Angke ?
 - A. Sangat bagus
 - B. Bagus
 - C. Sedang
 - D. Tidak bagus
3. Bagaimana sistem pengawas perikanan di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat bagus
 - b. Bagus

- c. Sedang
- d. Tidak bagus
- 4. Bagaimana pengaruh perbedaan pengelolaan kantor tpi dengan kantor pelabuhan ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh
- 5. Bagaimana pengaruh terbatasnya anggaran dana terhadap fasilitas PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh

Faktor Eksternal

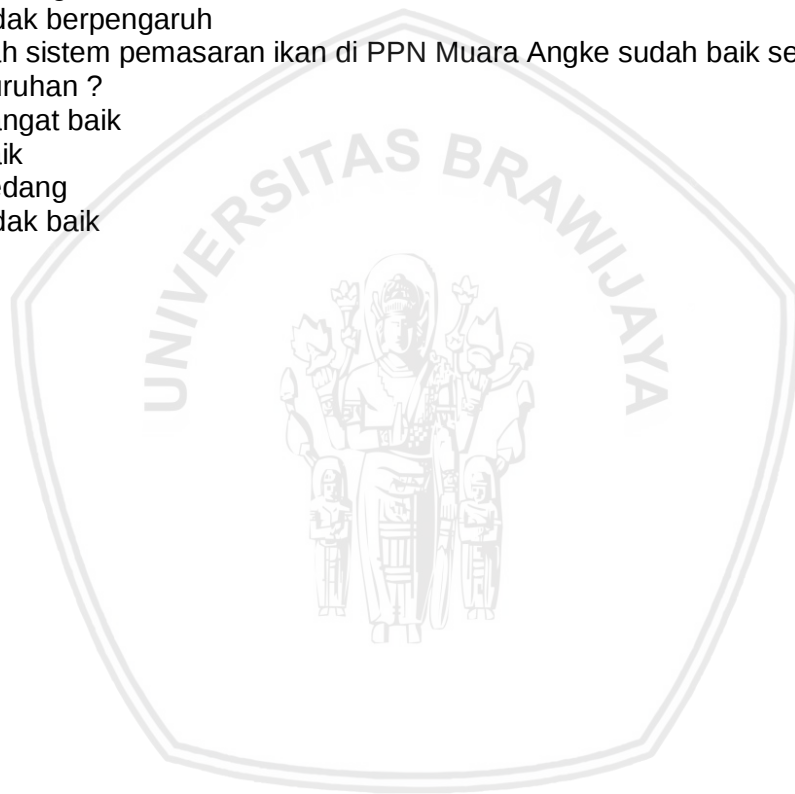
• Peluang (Opportunities)

- 1. Bagaimana besarnya jumlah faktor produksi ikan di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Sedang
 - d. Tidak besar
- 2. Bagaimana teknologi penangkapan ikan oleh kapal yang ada di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Sedang
 - d. Tidak baik
- 3. Apakah permintaan pasar terhadap ikan hasil tangkapan di PPN Muara Angke termasuk tinggi ?
 - a. Sangat tinggi
 - b. Tinggi
 - c. Sedang
 - d. Tidak tinggi
- 4. Apakah akses jalan dan transportasi yang ada di PPN Muara Angke sudah baik ?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Sedang
 - d. Tidak baik
- 5. Apakah PPN Muara Angke berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidakberpengaruh

• Ancaman (Threats)

- 1. Apakah sumberdaya manusia pelaku perikanan yang ada telah memenuhi peraturan yang berlaku ?
 - a. Sangat memenuhi
 - b. Memenuhi
 - c. Sedang
 - d. Tidak memenuhi
- 2. Apakah kegiatan illegal fishing sangat berpengaruh terhadap perikanan tangkap di PPN Muara Angke ?

- a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh
3. Apakah Pendapatan Pemerintah Provinsi di PPN Muara Angke berpengaruh terhadap penambahan fasilitas?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh
4. Bagaimana Pengaruh surat izin berlayar terhadap hasil tangkapan yang dilelangkan ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh
5. Apakah sistem pemasaran ikan di PPN Muara Angke sudah baik secara keseluruhan ?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Sedang
 - d. Tidak baik



Lampiran 3. Kuisisioner Pembobotan

KUISISIONER PEMBOBOTAN

Faktor Internal

- **Kekuatan (Strengths)**
 1. Apakah PPN Muara Angke berpotensi dalam peningkatan pentingnya pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum ?
 - a. Sangat berpotensi
 - b. Berpotensi
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpotensi
 2. Apakah fasilitas yang ada di PPN Muara Angke berpotensi dikembangkan dengan optimal secara keseluruhan ?
 - a. Sangat berpotensi
 - b. Berpotensi
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpotensi
 3. Bagaimana pengaruh biaya retribusi 0% terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh
 4. Bagaimana potensi pengembangan fasilitas di PPN Muara Angke terhadap seluruh sumberdaya manusia setempat ?
 - a. Sangat berpotensi
 - b. Berpotensi
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpotensi
 5. Apakah pemerintah berupaya dalam penambahan fasilitas di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat berupaya
 - b. Berupaya
 - c. Sedang
 - d. Tidak berupaya
- **Kelemahan (Weakness)**
 1. Apakah pencemaran air (limbah) berpengaruh dalam kegiatan perikanan di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh
 2. Bagaimana sistem pengolahan pelelangan ikan di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat bagus
 - b. Bagus
 - c. Sedang
 - d. Tidak bagus
 3. Bagaimana sistem petugas pengawas perikanan di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh

4. Bagaimana pengaruh perbedaan pengelolaan kantor TPI dengan kantor pelabuhan ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh
5. Bagaimana pengaruh terbatasnya anggaran dana terhadap fasilitas di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat berpengaruh
 - b. Berpengaruh
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpengaruh

Faktor Eksternal

• Peluang (Oppoturnities)

1. Bagaimana besarnya jumlah faktor produksi ikan di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat besar
 - b. Besar
 - c. Sedang
 - d. Tidak besar
2. Bagaimana teknologi penangkapan ikan oleh kapal yang ada di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Sedang
 - d. Tidak baik
3. Apakah potensi permintaan pasar terhadap ikan hasil tangkapan di PPN Muara Angke termasuk tinggi ?
 - a. Sangat tinggi
 - b. Tinggi
 - c. Sedang
 - d. Tidak tinggi
4. Apakah akses jalan dan transportasi yang ada di PPN Muara Angke sudah baik ?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Sedang
 - d. Tidak baik
5. Apakah PPN Muara Angke berpotensi dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat ?
 - a. Sangat berpotensi
 - b. Berpotensi
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpotensi

• Ancaman (Threats)

1. Apakah sumberdaya manusia pelaku perikanan yang ada telah memenuhi syarat peraturan yang berlaku ?
 - a. Sangat berpotensi
 - b. Berpotensi
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpotensi
2. Bagaimana potensi kegiatan illegal fishing sangat berpengaruh terhadap perikanan tangkap di PPN Muara Angke ?
 - a. Sangat berpotensi
 - b. Berpotensi

- c. Sedang
- d. Tidak berpotensi
- 3. Apakah Pendapatan Pemerintah Provinsi di PPN Muara Angke berpengaruh terhadap penambahan fasilitas ?
 - a. Sangat berpotensi
 - b. Berpotensi
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpotensi
- 4. Bagaimana Pengaruh surat izin berlayar terhadap hasil tangkapan yang dilelangkan ?
 - a. Sangat berpotensi
 - b. Berpotensi
 - c. Sedang
 - d. Tidak berpotensi
- 5. Bagaimana sistem pemasaran ikan di PPN Muara Angke sudah baik secara keseluruhan ?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Sedang
 - d. Tidak baik



Lampiran 4. Dokumentasi

